

**PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)**

(Tesis)

Oleh:

**IRANDA PUTRI
NPM 1926061004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

**PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)**

Oleh:

IRANDA PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Jurusan Magister Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)

Oleh

IRANDA PUTRI

Pemerataan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu amanat dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menindaklanjuti pernyataan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2019 lahir sebuah kebijakan bernama Sistem Zonasi Sekolah. Penelitian ini berfokus pada kebijakan Sistem Zonasi Sekolah lingkup SMA di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat kepentingan peran aktor dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif.

Pengolahan data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menggunakan teori Edward III untuk variabel implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai kriteria penelitian. Aktor implementasi terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan pendidikan yang berdasarkan teori Thompson terbagi menjadi empat kelompok yaitu *Key Players*, *Contest Setter*, *Subject* dan *Other Followers*.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepentingan variabel implementasi adalah; struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Sementara itu, tingkat kepentingan aktor implementasi adalah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Zonasi, Variabel Implementasi, Aktor Implementasi.

ABSTRACT

ROLE OF ACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY (Study on School Zoning System Policy)

By

IRANDA PUTRI

Equalization of access and quality of education is one of the mandates of Law Number 20 of 2013 on the National Education System. Follow up on the statement through the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 20 of 2019 a policy was born called School Zoning System. This research focuses on the policy of school zoning system in Lampung province. The purpose of the study was to determine the level of importance of the role of actors in the implementation of school zoning system policies. This type of research is descriptive qualitative. Data processing using Analytical Hierarchy Process (AHP). Using Edward III's theory for implementation variables namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure as research criteria. The implementation actors consist of the Lampung Provincial Education and Culture Office, the Lampung School Principal Working Assembly (MKKS), the Lampung Provincial Parliament, the Lampung Board of Education, the Indonesian Teachers Association (IGI) Lampung, the Lampung Education Quality Assurance Institute (LPMP), the Lecturer of Education Management and observers of education policy based on Thompson's theory are divided into four groups namely Key Players, Contest Setter, Subject and Other Followers. The results showed the importance of implementation variables is; bureaucratic structure, resources, communication and disposition. Meanwhile, the importance of actors is; Department of Education and Culture of Lampung Province, Working Council of Principals (MKKS) of Lampung, DPRD of Lampung Province, Board of Education of Lampung, Institute for Quality Assurance of Education (LPMP) Lampung, Indonesian Teachers Association (IGI) Lampung, Lecturer in Education Management and observer of education policy.

Key words: Zoning policies, Implementation variables, Implementation actors.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan tentang Kebijakan Publik	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik	11
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.1.4 Variabel Implementasi Kebijakan	20
2.2 Tinjauan tentang Aktor Implementasi Kebijakan Publik	23
2.2.1 Tipe Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.	24
2.2.2 Karakteristik Interaksi Aktor Pelaksana Kebijakan	27
2.2.3 Tipologi Interaksi Aktor	28
2.3 Tinjauan tentang Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	29
2.3.1 Pengertian Sistem Zonasi	30
2.3.2 Pentingnya Sistem Zonasi	31
2.3.3 Tujuan Sistem Zonasi	32
2.3.4 Regulasi Sistem Zonasi	32
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
2.5 Kerangka Pikir Penelitian.....	36
2.6 Hipotesis.....	39
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Tipe Penelitian	41
3.2 Objek dan Subjek Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42

3.3.1 Data Primer	42
3.3.2 Data Sekunder	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Instrumen Penelitian	46
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	46
3.6.1 Wawancara dan Kuesioner	46
3.6.2 Observasi	47
3.7 Analisis Data	47
3.7.1 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	47
3.7.2 Tahapan <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	52
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	65
4.1 Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2019.....	65
4.2 Zona Kecamatan Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Tingkat SMA di Provinsi Lampung	66
4.1.1 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan.....	67
4.1.2 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah	68
4.1.3 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara.....	69
4.1.4 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat.....	71
4.1.5 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang	72
4.1.6 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tanggamus	74
4.1.7 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur	75
4.1.8 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Way Kanan	76
4.1.9 Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Bandar Lampung	78
4.1.10 Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Metro	79
4.1.11 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesawaran.....	80
4.1.12 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Mesuji.....	81
4.1.13 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pringsewu.....	82
4.1.14 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	83
4.1.15 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat	84

4.3 Daya Tampung Sistem Zonasi Tingkat SMA di Provinsi Lampung	85
4.3.1 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan	85
4.3.2 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah	86
4.3.3 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara	87
4.3.4 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat	88
4.3.5 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang	89
4.3.6 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tanggamus	90
4.3.7 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur	91
4.3.8 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Way Kanan	92
4.3.9 Daya Tampung setiap SMA di Kota Bandar Lampung	93
4.3.10 Daya Tampung setiap SMA di Kota Metro	93
4.3.11 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesawaran	94
4.3.12 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Mesuji	95
4.3.13 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pringsewu	95
4.3.14 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat	96
4.3.15 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat	97
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	98
5.1 Tahap Mengolah Data <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	98
5.1.1 Mendefinisikan Masalah dan Menentukan Solusi	98
5.1.2 Membuat Struktur Hierarki yang Diawali dengan Tujuan Utama	100
5.1.3 Mendefinisikan Perbandingan Berpasangan	101
5.1.4 Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan	104
5.1.5 Melakukan Normalisasi dan Menentukan <i>Eigen Vector</i> tiap Elemen	106
5.1.6 Mengalikan Matriks Awal dengan <i>Eigen Vector</i> tiap Elemen	109
5.1.7 Menghitung Konsistensi Hierarki	112
5.1.8 Mengalikan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap	118

	Kriteria dengan <i>Eigen Vector</i> Kriteria.....	
5.2	Pembahasan Hasil Akhir <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	119
5.2.1	Kriteria: Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.....	119
5.2.2	Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Implementasi Kebijakan.....	124
5.3	Hasil Akhir: <i>Eigen Vector</i> Alternatif dan Kriteria terhadap <i>Eigen Vector</i> Kriteria.....	136
5.3.1	Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Key Players</i>	137
5.3.2	Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Contest Setter</i>	138
5.3.3	Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Subject</i>	139
5.3.4	Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Other Followers</i>	140
VI.	SIMPULAN DAN SARAN	142
6.1	Simpulan	142
6.2	Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA

KUISIONER

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Sekolah di Provinsi Lampung.....	4
Tabel 2. Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019	5
Tabel 3. Manajemen Kegiatan Implementasi Kebijakan Publik.....	17
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 5. Informan Penelitian	44
Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan Dalam Penelitian	55
Tabel 7. Skala Perbandingan Berpasangan Dalam Penelitian	56
Tabel 8. Jumlah Normalisasi Kriteria: Variabel Implementasi.....	58
Tabel 9. Jumlah Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi	58
Tabel 10. Jumlah Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	58
Tabel 11. Jumlah Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	59
Tabel 12. Jumlah Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	59
Tabel 13. Rata-rata Normalisasi Kriteria: Variabel Implementasi	60
Tabel 14. Rata-rata Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi.....	60
Tabel 15. Rata-rata Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	61
Tabel 16. Rata-rata Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	61
Tabel 17. Rata-rata Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	62
Tabel 18. Lamda Maksimal (λ) tiap Elemen	63
Tabel 19. <i>Consistency Index</i> (CI) tiap Elemen	63
Tabel 20. <i>Consistency Ratio</i> (CR) tiap Elemen	64
Tabel 21. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan.....	67
Tabel 22. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah	68
Tabel 23. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara	69

Tabel 24. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat.....	71
Tabel 25. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang	72
Tabel 26. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tanggamus	74
Tabel 27. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur	75
Tabel 28. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Way Kanan	76
Tabel 29. Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Bandar Lampung.....	78
Tabel 30. Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Metro.....	79
Tabel 31. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesawaran	80
Tabel 32. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Mesuji	81
Tabel 33. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pringsewu	82
Tabel 34. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	83
Tabel 35. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat....	84
Tabel 36. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan.....	85
Tabel 37. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah	86
Tabel 38. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara .	87
Tabel 39. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat .	88
Tabel 40. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang .	89
Tabel 41. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tanggamus	90
Tabel 42. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur	91
Tabel 43. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Way Kanan	92
Tabel 44. Daya Tampung setiap SMA di Kota Bandar Lampung	93
Tabel 45. Daya Tampung setiap SMA di Kota Metro	93
Tabel 46. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesawaran	94
Tabel 47. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Mesuji	94
Tabel 48. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pringsewu.....	95
Tabel 49. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	96
Tabel 50. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat	97
Tabel 51. Pemetaan Masalah dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	99
Tabel 52. Skala Perbandingan Kriteria: Variabel Implementasi.....	101
Tabel 53. Skala Perbandingan Alternatif: Aktor Implementasi	102
Tabel 54. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria	104
Tabel 55. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi	105
Tabel 56. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya	105
Tabel 57. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Disposisi	106
Tabel 58. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi	106

Tabel 59. Normalisasi dan <i>Eigen Vector</i> Kriteria	107
Tabel 60. Normalisasi dan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi.....	107
Tabel 61. Normalisasi dan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya	108
Tabel 62. Normalisasi dan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Disposisi	108
Tabel 63. Normalisasi dan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi	109
Tabel 64. Hasil Kali Matriks Awal dengan <i>Eigen Vector</i> Kriteria	109
Tabel 65. Hasil Kali Matriks Awal dengan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi.....	110
Tabel 66. Hasil Kali Matriks Awal dengan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya	111
Tabel 67. Hasil Kali Matriks Awal dengan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Disposisi	111
Tabel 68. Hasil Kali Matriks Awal dengan <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi	112
Tabel 69. <i>Random Index</i> dalam <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	113
Tabel 70. <i>Random Index</i> dalam <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	114
Tabel 71. <i>Random Index</i> dalam <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	115
Tabel 72. <i>Random Index</i> dalam <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	116
Tabel 73. <i>Random Index</i> dalam <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	117
Tabel 74. Hasil Kali <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria dengan <i>Eigen Vector</i> Kriteria	118
Tabel 75. <i>Eigen Vector</i> Kriteria	119
Tabel 76. <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi	125
Tabel 77. <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya	128
Tabel 78. <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Disposisi	131
Tabel 79. <i>Eigen Vector</i> Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi	133
Tabel 80. Hasil Akhir Hierarki Kepentingan Aktor Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	136

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Implementasi Kebijakan Publik	21
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian	38
Gambar 3. Struktur Hierarki Dalam Penelitian	54
Gambar 4. Tujuan, Kriteria dan Alternatif Penelitian	
Gambar 5. Diagram Batang Hasil Akhir	119

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik sebagai ilmu, secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an dan relatif baru karena sebagai sebuah disiplin. Sejak itu, kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wahab, 2012). Dalam berbagai tingkatan proses kebijakan seperti formulasi, implementasi dan evaluasi akan melibatkan banyak peran individu maupun kelompok, mereka yang melibatkan diri berperan dalam sebuah proses kebijakan dikenal dengan aktor kebijakan.

Menurut Agustino, Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana implementasi berbentuk aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Purwanto dan Sulistyastuti., 1991). Implementasi kebijakan sendiri harus secara mutlak melibatkan aktor-aktor yang perannya mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebagaimana dinyatakan para terdahulu bahwa keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tidaklah bebas nilai atau bebas dari kepentingan (Handayani dan Warsono, 2017)

Kajian terhadap aktor perumus dan pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan (Lester, 2000). Thompson mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan

dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, perbedaan tinggi dan rendahnya kekuatan dan kepentingan akan menghasilkan empat kategori aktor yaitu *key players*, *contest setter*, *subject* dan *other followers* (Edward III, 1990)

Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Makna ayat 1 pasal 31 UUD 1945 tersebut bahwa pendidikan berhak didapatkan setiap warga negara tanpa terkecuali. Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis agama, dan gender. Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan.

Adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Selain peningkatan akses pendidikan, pemerataan mutu pendidikan juga sedang diprogramkan pemerintah.

Berkaitan dengan kondisi mutu pendidikan, terlihat masih belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia. Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi

beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, kemudian peraturan ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan pada tahun 2019 diperbaharui kembali menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019, ketiga peraturan ini sama-sama membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan meratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem PPDB zonasi juga menekankan bagaimana setelah siswa menyebar kemudian ada pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, merata ke setiap wilayah, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Perdana, 2019).

Sistem PPDB zonasi mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan

prestasi paling banyak 15% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali (Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019).

Sebagai bagian dari Indonesia, Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten/Kota dengan cukup banyak sarana pendidikan dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD)/sederajat hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Penelitian ini berfokus pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di Provinsi Lampung sebab SMA di Provinsi Lampung memiliki jumlah paling rendah jika dibandingkan dengan jumlah SD maupun SMP, sedangkan PPDB Zonasi hanya ditujukan untuk sekolah negeri milik pemerintah daerah, hal ini tentunya akan lebih mempersempit pilihan para calon siswa SMA di Provinsi Lampung untuk menentukan sekolah yang mereka inginkan berdasarkan sistem zonasi. Berikut adalah data jumlah sekolah di Provinsi Lampung dan sebaran hasil PPDB Zonasi tingkat SMA di Provinsi Lampung tahun 2019:

Tabel 1. Jumlah Sekolah di Provinsi Lampung

No	Sekolah	Kategori		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	SD	4410	1116	5526
2	SMP	734	1378	2112
3	SMA	110	375	485
Total				8954

Sumber: (Kemendikbud, 2019a)

Tabel 2. Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Daya Tampung		Jarak Rumah ke Sekolah			
		Paling Rendah	Paling Tinggi	IPA		IPS	
				Paling Dekat	Paling Jauh	Paling Dekat	Paling Jauh
1	Kabupaten Lampung Selatan	126 siswa	385 siswa	7 meter	29603 meter	7 meter	24649 meter
2	Kabupaten Lampung Tengah	141 siswa	432 siswa	8 meter	96526 meter	19 meter	991865 meter
3	Kabupaten Lampung Utara	68 siswa	328 siswa	6 meter	40287 meter	2 meter	39441 meter
4	Kabupaten Lampung Barat	40 siswa	273 siswa	12 meter	28149 meter	28 meter	87579 meter
5	Kabupaten Tulang Bawang	104 siswa	252 siswa	0 meter	138399 meter	21 meter	694172 meter
6	Kabupaten Tanggamus	64 siswa	310 siswa	35 meter	31148 meter	35 meter	31416 meter
7	Kabupaten Lampung Timur	144 siswa	325 siswa	0 meter	727812 meter	7 meter	863889 Meter
8	Kabupaten Way Kanan	60 siswa	321 siswa	0 meter	1123390 meter	0 meter	228731 Meter
9	Kota Bandar Lampung	144 siswa	428 siswa	12 meter	17027 meter	17 meter	7550 Meter
10	Kota Metro	263 siswa	330 siswa	62 meter	14401 meter	95 meter	41453 Meter
11	Kabupaten Pesawaran	107 siswa	390 siswa	51 meter	30683 meter	73 meter	38797 Meter
12	Kabupaten Mesuji	172 siswa	200 siswa	9 meter	50688 meter	9 meter	628128 Meter
13	Kabupaten Pringsewu	180 siswa	354 siswa	34 meter	77673 meter	22 meter	35569 Meter
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	30 siswa	336 siswa	5 meter	20484 meter	4 meter	33487 Meter
15	Kabupaten Pesisir Barat	105 siswa	314 siswa	16 meter	2209410 meter	16 meter	662405 Meter

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

Dikaitkan dengan studi kasus PPDB zonasi tingkat SMA di Provinsi Lampung, maka aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah; perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, perwakilan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, perwakilan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP Unila, Pengamat Kebijakan Pendidikan sebagai subjek penelitian. Peran para aktor ini akan dikaji lebih lanjut dan peneliti berusaha menemukan siapa aktor yang memiliki peran paling dominan sesuai dengan variabel implementasi yang ada dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran aktor kebijakan publik dalam implelementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan bagaimana peran aktor kebijakan publik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu administrasi publik dalam hal peran aktor dominan dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan narasumber penelitian tentang bagaimana memilih aktor paling dominan dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah sesuai dengan variabel implementasi kebijakan yang telah tersedia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Dye, 1978). Apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik. Sementara, Eyestone mengemukakan bahwa kebijakan adalah hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan antara unit-unit dalam lembaga pemerintah adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down* (Eyestone, 1971). Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan, baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2012). Wilson mengemukakan bahwa kebijakan itu tindakan objektif dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil untuk melaksanakannya, dan penjelasan yang mereka berikan tentang apa yang terjadi atau tidak terjadi (Wilson, 1989).

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pakar Inggris, W.I. Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Jenkins, 1978). Seorang pakar dari Nigeria, Chief J.O. Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Udoji, 1981).

Sementara itu Parsons, memberikan gagasan tentang kebijakan adalah sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya, kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Parsons, 2006). Syafiie mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Syafiie, 2006).

Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (Agustino, 2012). Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan, kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor non pemerintah (Winarno, 2012). Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Easton, 1953). Laswell

dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Lasswell, H.D dan Kaplan, 1970).

Jenkins melihat kebijakan yang terbatas kekuasaan, Udoji menilai kebijakan adalah sarana yang saling berkaitan, dan Parsons memahami kebijakan sebagai cara yang terstruktur. Ketiganya sama-sama mendefinisikan kebijakan publik sebagai sarana mencapai tujuan namun menurut cara pandang berbeda. Ketiga pendapat tersebut kemudian selaras dengan ungkapan Syafiie yang menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sarana mencapai tujuan melalui cara dan tindakan yang saling berkaitan dan mempengaruhi.

Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya. Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan. Sementara itu, Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa. Paparan definisi ditutup dengan pendapat Laswell dan Kaplan yang menarik benang merah dari ketiga definisi kebijakan publik tersebut dengan menyatakan kebijakan publik sebagai program untuk mencapai tujuan dengan nilai terarah.

Dalam hal definisi kebijakan publik yang paling relevan untuk penelitian ini adalah pendapat Inu Kencana Syafiie yang mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Syafiie, 2006). Sebab kebijakan Sistem Zonasi Sekolah hadir sebagai solusi atas permasalahan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, setelah memahami mengenai definisi kebijakan publik maka akan dijelaskan bahwa kebijakan publik memiliki tingkatan yang nantinya

akan menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan lahir dan apa saja yang dipertimbangkan sebelum membuat sebuah kebijakan.

2.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, kebijakan publik yang bersifat (*meso*) atau menengah yaitu penjabar pelaksanaan kebijakan publik dan yang bersifat *mikro* yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya (Nugroho, 2006). Terkait dengan hierarki kebijakan secara umum Abidin membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis (Abidin, 2004).

Younis, membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni: formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Younis, 1990). Sedangkan Gortner, menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan, yakni pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi, keempat aplikasi dan kelima evaluasi (Gortner, 1984). Starling menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik yaitu *identification of needs*, formulasi usulan kebijakan, adopsi, pelaksanaan program dan evaluasi (Starling, 1977).

Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen yaitu *goal, plans, programs, decisions* dan *efec* (Jones, 1996). Kaji, mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik yaitu kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan, kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah

publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif) (Kadji, 2008).

Meringkas pendapat para ahli di atas, Nugroho merumuskan kebijakan memiliki tingkat; makro, meso dan mikro. Abidin merumuskan kebijakan memiliki tingkat; umum, pelaksanaan dan teknis. Yownis merumuskan kebijakan memiliki tingkat; formasi dan desain, implementasi dan evaluasi. Gortner merumuskan kebijakan memiliki tingkat; identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi. Terakhir, Jones merumuskan kebijakan memiliki tingkat; *goal, plans, program, decisions efec.*

Dalam penelitian ini, pendapat Yownis merupakan teori paling relevan sebab penelitian ini fokus terhadap implementasi kebijakan yaitu tahap ke-2 kebijakan yang telah dirumuskan oleh Yownis. Pendapat Yownis ini juga merupakan pendapat paling umum yang sering ditemui dalam hal hierarki proses kebijakan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai implementasi kebijakan. Bahasan ini merupakan bahasan paling penting dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan sebagai *grand theory* yang nantinya akan menghasilkan turunan teori-teori lain sebagai fokus dari penelitian ini. Implementasi merupakan bagian penting yang harus selalu diperhatikan guna tercapainya sebuah tujuan yang tertuang dalam kebijakan.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan (Hedegaard Sørensen dan Paulsson, 2020). Itulah sebabnya dalam implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, menurut Djadja Saefullah dalam

praktanya bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni ;

- a. Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.
- b. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas (Tachjan., 2006).

Tachjan juga mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu (Tachjan., 2006). Dunn, memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai sehubungan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi (Dunn, 2004). Jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Apabila sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai

tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Nugroho menawarkan dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003).

Sementara itu Wahab mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya (Wahab, 2012). Ini berarti bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada *action intervention* itu sendiri (Naihasyi, 2006).

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan. Van Meter Van Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Wahab, 2012). Sedangkan Nakamura dan Smallwood mengemukakan bahwa implementasi adalah “(1) *a declaration government preferences*; (2) *mediated by a number of actors who*; dan (3) *create a circular proces characterized by reciproaal power relations and negotiations*. (Nakamura, 1980).

Sementara itu Gunn dan Hoogwood mengemukakan implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial (Sunggono, 1994) . Sehubungan dengan itu Nugroho mengartikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan (Nugroho, 2003). Hal ini sejalan dengan pandangan Salusu yang mengartikan implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah (Salusu, 2003).

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan (Subarsono, 2005). Bertolak dari uraian di atas, maka implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan (Wibawa dan Samodra, 1994).

Apabila pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) ketika kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Parsons, 2006). Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik dan sebagainya (Kurniawan dkk, 2020).

Sehubungan dengan itu Anderson menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan dan efek atau dampak dari implementasi (Anderson, James, 1997). Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Senada dengan itu, Tangkilisan menjelaskan Ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan, yaitu penafsiran, organisasi dan penerapan (Tangkilisan, S Nogi, 2002).

Abidin mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Abidin, 2004). Selain itu Abidin juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan kejiwaan, dan pendekatan politik. Sehubungan dengan itu maka, Nugroho dan Naihasyi menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003) dan (Naihasyi, 2006).

Sehubungan dengan itu, maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan implementasi kebijakan, yaitu peralatan kebijakan, dan kewenangan yang tersedia untuk melakukan implementasi (Abidin, 2004). Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa dan Samodra, 1994). Sejalan dengan itu maka Nugroho menjelaskan bahwa manajemen kegiatan implementasi kebijakan dapat disusun secara

berurutan melalui tahapan-tahapan sebagai implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakkan dan kepemimpinan, pengendalian (Nugroho, 2003). Secara jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Manajemen Kegiatan Implementasi Kebijakan

No	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi Strategi (Pra Implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mongoperasikan strategi
		Desain organisasi dan struktur organisasi
2.	Penggorganisasian	Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
		Integrasi dan koordinasi
		Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
		Hak, wewenang, dan kewajiban
		Pendelegasian
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
3	Penggerakan dan Kepemimpinan	Budaya organisasi
		Efektivitas Kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerja sama tim
		Komunikasi Organisasi
4.	Pengendalian	Negosiasi
		Desain pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian anggaran/keuangan audit

Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

Uraian di atas menunjukkan bahwa inti dari implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, penting juga diperhatikan adalah perlunya pedoman yang dapat mengarahkan ruang gerak dari pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom di dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Pedoman ini membantu pelaksana

untuk menyesuaikan diri apabila ada hal-hal yang bersifat khusus yang ditemukan ketika melakukan implementasi keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan sentralistis atau dari atas ke bawah. Sehubungan dengan itu, Abidin menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna, karena menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Hal ini sejalan dengan Salusu yang menyetir pandangan dari Alexander tentang masalah yang sering dijumpai dalam melaksanakan suatu strategi, yaitu:

- a. Jangka waktu pelaksanaan lebih lama dari yang direncanakan, koordinasi tidak berjalan secara efektif, pelaksana tidak memiliki keterampilan yang memadai, faktor eksternal kurang terkontrol dan sering dilupakan.
- b. Kualitas kepemimpinan yang kurang memadai, sehingga pengarahan, instruksi kepada karyawan sering tidak tepat, pelatihan yang disyaratkan jarang dilakukan, monitoring atas pelaksanaan tugas eselon bawah sangat lemah (Salusu, 2003).

Masalah lain yang sering muncul yaitu implementasi sering mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Kesenjangan ini menurut Warnham disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan, kurangnya informasi dan tujuan-tujuan dari unit-unit organisasi sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuikannya (Salusu, 2003). Selain itu kesenjangan tersebut boleh jadi disebabkan karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya dan karena mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan (Abidin, 2004).

Meringkas beberapa teori mengenai implementasi kebijakan publik yang ada, peneliti mencoba menarik benang merah dari beberapa ahli mengenai pendapat mereka terhadap definisi implementasi kebijakan publik sebagai berikut;

- a. Dunn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses politik administrasi.
- b. Adiwiastara mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai kemampuan pelaksana merespon dan memahami harapan masyarakat.
- c. Wahab mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan identifikasi masalah, menyebutkan tujuan dan mengatur implementasi.
- d. Naihasyi mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai kegiatan interaktif dan berkaitan dengan proses sebelum dan sesudahnya.
- e. Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.
- f. Nakamura dan Smallwood mendefinisikan implementasi kebijakan publik deklarasi pilihan pemerintah dengan aktor-aktor terlibat melalui kekuatan hubungan dan negosiasi.
- g. Gun dan Hogwood mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai sesuatu yang sangat esensial dari teknik dan masalah manajerial.
- h. Nugroho mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan.
- i. Salusu mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai operasionalisasi aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan menyentuh seluruh jajaran.
- j. Anderson mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses dinamis melibatkan usaha mencapai penempatan program ke keputusan yang digunakan.

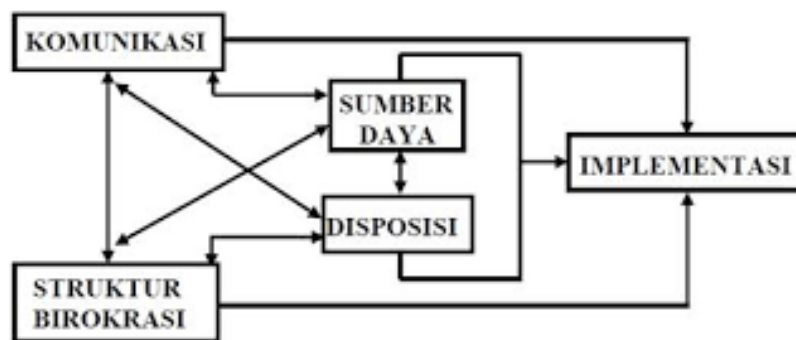
- k. Wibawa mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai cara menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan teori yang ada, teori Horn adalah teori yang paling tepat, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sebagaimana faktanya, tujuan pemerataan pendidikan telah dituliskan di tiap-tiap kebijakan sampai pada lahirnya kebijakan Sistem Zonasi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai variabel implementasi kebijakan publik. Teori variabel implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini digunakan sebagai *middle theory* yang tidak kalah penting dari *grand theory*. *Middle theory* berupa variabel digunakan sebagai kriteria penilaian untuk mendapatkan aktor yang perannya paling dominan dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Setelah membahas mengenai implementasi kebijakan publik kita juga harus memahami variabel apa saja yang ada di dalamnya.

2.1.4 Variabel Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 2012). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 1994). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1990.) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Publik.

Sumber: (Edward III, 1990)

a. Komunikasi

Menurut George Edwards III, komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi tentang kebijakan antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini menyangkut transfer pengetahuan yang meliputi hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan dan lainnya. Edward berpendapat bahwa faktor *clarity* (kejelasan) menjadi penting dalam proses implementasi kebijakan. Tidak adanya pemaknaan yang ambigu.

Intinya, kejelasan tidak identik dengan informasi yang berlebihan, dimana Edwards menyebutnya dengan *overly specific instruction*, yang dapat menghilangkan fleksibilitas dan akan berujung pada kebijakan menjadi kaku. *Consistency* (konsisten) menjadi ukuran lain bagi Edwards dalam proses komunikasi implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Efektifitas kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan secara efektif dan baik ketika tidak di dukung oleh potensi-potensi sumber daya yang tidak tersedia. Diyakini bahwa sumberdaya-sumberdaya yang potensial akan berdampak langsung pada proses implementasi kebijakan. Termasuk dalam sumberdaya antara lain staf yang relatif jumlahnya yang disertai dengan kemampuan dan keahlian yang memadai untuk keperluan implementasi kebijakan. Sisi lain, informasi yang memadai, kewenangan yang dimiliki implementor, adanya fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana.

c. Disposisi

Edwards menterjemahkan disposisi sebagai pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi pelaksana kebijakan publik. Harus terjadinya korelasi positif atas sikap, pandangan, kesungguhan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Hal terpenting dari disposisi yaitu staff birokrasi yang menekankan pada penempatan staf yang benar-benar kapabel dan selaras demi menjamin terlaksananya kebijakan. Kedua, yaitu pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan sebagai sarana pengendalian bagi pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang direncanakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi menurut Edwards, faktor terakhir yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Dalam konteks ini Edwards membidik persoalan struktur dalam hal mendasar yaitu

struktur birokrasi harus memiliki standar operasional prosedur yang merupakan pedoman langkah-langkah yang harus disepakati bersama berupa keseragaman pola dalam menjalankan proses implementasi kebijakan. Edwards menjelaskan bahwa fragmentation merupakan pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Fragmentasi ini akan membawa konsekuensi besar dalam keberhasilan proses implementasi. Dalam konteks ini, Edwards mempertegas, bahwa pembagian pusat koordinasi harus dibagi dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan porsinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat George Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitanya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui aktor manakah yang paling dominan sesuai dengan kriteria penilaian yang ada untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Teori George Edward III mengenai empat variabel implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi kriteria penilaian untuk menentukan aktor dominan sekaligus menjadi *middle theory* dalam penelitian ini.

2.2 Tinjauan Tentang Aktor Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan (termasuk kebijakan pendidikan) merupakan perangkat operasional, atau pedoman-pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh lembaga politik (U. B. Wibowo, 2013). Dalam pembahasan tentang kebijakan publik, Aktor mempunyai posisi yang amat strategis. Interaksi Aktor dan kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas (Pritasari, 2019). Pada prinsipnya aktor kebijakan

adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik (Madani, 2011).

Demikian dapat dipahami bahwa makna aktor dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik (Fauzi dan Dewi Rostyaningsih, 2018). Dalam perspektif lain, sebagaimana ditegaskan oleh Anderson bahwa model atau tipe pengambilan kebijakan dikaitkan dengan proses pembahasannya dalam agenda kebijakan publik dapat dibedakan dalam tiga bentuknya, yaitu pola kerjasama (*bargaining*), persuasif (*persuasion*), dan pengarahannya (*commanding*) (Madani, 2011).

2.2.1. Tipe Aktor Dalam Proses Kebijakan

Kajian terhadap aktor perumus dan pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan (Lester, 2000).

2.2.1.1 Empat Golongan Aktor Menurut (Jones, 1996)

a. Golongan Rasionalis

Ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ialah bahwa dalam melakukan pilhan alternatif kebijaksanaan mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu, mengidentifikasi semua alternatif kebijaksanaan, meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap alternatif, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan, memilih alternatif terbaik (Meutia, 2017).

b. Golongan Teknis

Seorang teknisi pada dasarnya tidak lebih dari rasionalis, sebab ia adalah seorang yang karena bidang keahliannya atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijaksanaan. Golongan teknisi dalam melaksanakan tugasnya boleh jadi memiliki kebebasan namun kebebasan ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya. Biasanya mereka bekerja di proyek-proyek yang membutuhkan keahliannya, namun apa yang harus mereka kerjakan biasanya ditetapkan oleh pihak lain (Meutia, 2017).

c. Golongan Inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis ini dapat kita identikkan dengan para politisi. Golongan inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan kebijaksanaan dan implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus menerus terhadap hasil akhir (yang berjangka dekat maupun yang berjangka panjang) dari suatu tindakan. Bagi golongan inkrementalis, informasi dan pengetahuan yang kita miliki tidak akan pernah mencukupi untuk menghasilkan suatu program kebijaksanaan yang lengkap. Gaya kerja golongan inkrementalis ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang mampu melakukan tawar-menawar atau *bargaining* (Meutia, 2017).

d. Golongan Reformis (Pembaharu)

Golongan reformis memiliki tekanan perhatiannya adalah pada tindakan sekarang, karena urgensi dari persoalan yang dihadapi. Pendekatan semacam itu umumnya ditempuh oleh para *lobbyist*. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial, kadang kala demi perubahan sosial itu sendiri namun lebih sering bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan

kelompok tertentu. Tujuan kebijaksanaan biasanya ditetapkan dalam lingkungan kelompok-kelompok tersebut, melalui berbagai macam proses termasuk diantaranya atas dasar keyakinan pribadi bahwa hasil akhir dari tindakan pemerintah sekarang telah melenceng atau bahkan gagal (Meutia, 2017).

2.2.1.2 Empat Golongan Aktor Menurut (Thompson, 1967):

- a. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (*KeyPlayers*). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
- b. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*contestsetters*). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi *keyplayers* karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan (Thompson, 1967).
- c. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (*Subjects*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.
- d. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan

pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.

Teori Thompson merupakan teori yang ideal untuk membantu mengklasifikasikan aktor dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Thompson membagi 4 kelompok aktor dengan melihat masing-masing kekuatan dan kepentingan aktor. Perbedaan kekuatan dan kepentingan aktor juga akan berimbas terhadap peran yang akan dijalankan oleh masing-masing aktor dalam kebijakan ini. Teori Thompson peneliti gunakan sebagai *application theory* dalam penelitian ini sebab kriteria mengenai kekuatan dan kepentingan masing-masing aktor peneliti jadikan variabel yang membantu mengklasifikasikan masing-masing aktor ke dalam golongan yang sudah tersedia.

2.2.2 Karakteristik Interaksi Aktor Pelaksana Kebijakan

Interaksi yang terjadi umumnya berbentuk kerjasama (*cooperation*) dan bahkan pertikaian atau pertentangan (*competition*). Gillin dalam Soekanto menyatakan penggolongan proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Proses interaksi asosiatif terbagi dalam bentuk-bentuk kerjasama (*corporation*), akomodasi (*accomodation*) yang terbagi dalam; *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*, *concilitation*, *toleration*, *stalemate*, *adjudication* dan asimilasi (*assimilation*). Sedangkan proses interaksi disosiatif terbagi dalam bentuk-bentuk persaingan (*competition*), kontravensi (*contravension*), pertentangan dan pertikaian (*conflict*) (Rijal dkk, 2013).

Interaksi dalam proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama maupun persetujuan. Menurut para Sosiolog, bentuk interaksi paling utama adalah kerjasama diantara orang perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama (Madani, 2011). Bentuk interaksi lainnya yang termasuk dalam proses asosiatif adalah akomodasi (*accomodation*). Bentuk ini pada dasarnya adalah

upaya dalam mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian organisasi yang terlibat didalamnya (Madani, 2011).

Bentuk interaksi menurut Gillin merupakan bentuk interaksi paling tepat yang cocok dipadukan dengan penelitian mengenai interaksi jenis apapun termasuk dalam penelitian ini. Ada banyak aktor terlibat dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dimulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi. Banyaknya aktor ini hanya menimbulkan dua kemungkinan bentuk interaksi yaitu asosiatif dan disosiatif. Kunci keberhasilan kebijakan salah satunya adalah dengan adanya interaksi yang sifatnya asosiatif.

2.2.3 Tipologi Interaksi Aktor Kebijakan

Menurut Stone terdapat 4 (empat) tipe interaksi dalam penggunaan kekuasaan antar institusi yaitu:

2.2.3.1 *Decisional*

Interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat untuk memperjuangkan kepentingannya atau dalam konteks kebijakan adalah untuk menetapkan pilihan akhir kebijakan. Interaksi ini juga dapat terjadi karena adanya kelompok kepentingan seperti bisnis yang secara langsung memberikan dukungan kepada pihak atau kelompok tertentu seperti pada saat pemilihan umum atau kampanye.

2.2.3.2 *Anticipated Reaction*

Interaksi yang bersifat langsung namun yang terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya pada situasi tertentu.

2.2.3.3 *Nondecision Making*

Interaksi yang diidentifikasi adanya kelompok yang kuat atau mayoritas berupaya mempengaruhi kebijakan. Interaksi tipe ini juga dapat melibatkan pihak ke tiga atau eksternal untuk mendukung salah satu aktor kebijakan. Pengaruh eksternal ini menjadi bagian dari kekuasaan dan kepentingan elit.

2.2.3.4 *Systemic*

Interaksi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh system seperti sistem politik, ekonomi, sosial. Hal ini diidentifikasi melalui perilaku elit/ pejabat yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Dalam tipe interaksi ini penggunaan kekuasaan dilakukan oleh tiga kelompok atau aktor yang menempatkan pejabat public pada posisi tengah. Interaksi tidak langsung ditandai terjadinya interaksi antara kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi elit kebijakan dengan tujuan agar kepentingannya dapat menjadi pilihan kebijakan, namun di satu sisi, penggunaan dukungan kelompok kepentingan dinilai strategis oleh elit kebijakan untuk memperkuat prioritas pilihan kebijakannya (Madani, 2011).

2.3 Tinjauan tentang Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Kebijakan pelaksanaan sistem Zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) masih relatif baru. Banyak permasalahan yang muncul di masyarakat dan para orang tua terkait dengan sistem baru dalam seleksi penerimaan peserta didik ini. Para orang tua dan masyarakat sepertinya masih ragu akan efektivitas dan efisiensi dari program Sistem Zonasi PPDB ini. Dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB dan implikasinya pada peningkatan mutu pendidikan. Semula, uraian sistem zonasi ini diorientasikan pada panduan pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB, namun

dalam perkembangannya perlu dikembangkan pada Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangan kebijakannya.

2.3.1 Pengertian Sistem Zonasi

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Dengan sistem zonasi semua – khususnya sekolah negeri – disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit (Kemendikbud, 2019b).

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali (Kemendikbud, 2019b).

Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Kemendikbud, 2019b).

2.3.2 Pentingnya Sistem Zonasi

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka (Kemendikbud, 2019b)

Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar. Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus dan nyaman, guru-guru terpilih dan terbaik, penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah

disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian (Kemendikbud, 2019b)

Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “*labeling*” sekolah yang mempertahankan “*status quo*” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air (Kemendikbud, 2019b).

2.3.3 Tujuan Sistem Zonasi

Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat digunakan oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan (Kemendikbud, 2019b)

2.3.4 Regulasi Sistem Zonasi

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 yang menyatakan pada Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pada Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Upaya memenuhi tugas dan fungsi dalam melayani hak warga untuk mendapat pendidikan perlu didukung oleh peraturan terkait sebagai turunan dari UUD 1945 tersebut (Kemendikbud,2018).

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Dengan peraturan ini memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Sistem Zonasi akan menjadi setiap sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik, tidak ada lagi istilah-istilah yang membuat adanya “kasta” atau “*labeling*” pada sekolah dan semua yang terlibat di dalamnya (Kemendikbud,2020).

2.4 Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan, implementasi kebijakan dan peran aktor kebijakan. Namun, penelitian ini memandang peran aktor kebijakan dengan perspektif yang berbeda. Jika pada umumnya peran aktor kebijakan dikaitkan dengan formulasi kebijakan, penelitian ini berfokus pada peran aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan yang nantinya akan dilihat aktor yang memiliki peran paling penting berdasarkan variabel dalam implementasi sebuah kebijakan. Berikut adalah penelitian terdahulu sejenis yang juga penulis jadikan sebagai beberapa landasan rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Identitas Karya Ilmiah				Isi Karya Ilmiah		
	Peneliti	Universitas	Tahun	Jenis	Teori	Metode	Hasil
1	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM SENI BUDAYA KETERAMPILAN DI SEKOLAH DASAR NASIONAL 1, BEKASI, JAWA BARAT						
	(Maliki)	UI	2012	Tesis	George Edward III mengungkapkan ada 4 (empat) faktor penting dalam implementasi kebijakan.	Kualitatif yang bersifat deskriptif.	Proses komunikasi, koordinasi, komitmen, tanggungjawab yang dilakukan secara terstruktur dan tersebar secara akurat, jelas dan konsisten akan mereduksi berbagai kendala yang mungkin terjadi.
2	ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)						
	(R. F. Wibowo & Rostyani ngsih)	UNDIP	2016	Jurnal	Thompson mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan dikategorikan menjadi 4 jenis.	Kualitatif yang bersifat deskriptif.	<i>Key Players:</i> Bappeda dan Dinas Tata Kota Perumahan,. <i>Contest Setter:</i> Konsultan Jasa. <i>Subjects:</i> Satpol PP. Pengikut Lain: masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan.
3	KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN						
	(Fauzela)	UNILA	2019	Tesis	Siregar mengungkapkan (KPS) memiliki bentuk Built-Operate-Transfer (BOT), Built-Transfer-Operate (BTO) dan Built-Transfer (BT).	Kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan <i>Anaytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Urutan prioritas: Built Transfer (BT), Built Operate Transfer (BOT) dan Built Transfer Operate (BTO).

Sumber: diolah peneliti, 2021

Penelitian pertama berusaha memecahkan persoalan implementasi kurikulum seni budaya dan keterampilan menggunakan teori George Edward III yang mengungkapkan ada empat faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber daya, karakter atau sikap, dan struktur birokratik. Sementara penelitian ini juga menggunakan teori Edward III sebagai *middle theory*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Maliki adalah dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III mengenai variabel implementasi kebijakan dan selanjutnya akan dikaitkan dengan teori Thompson tentang klasifikasi aktor implementasi kebijakan sebab aktor-aktor tersebutlah yang nantinya akan menggunakan variabel implementasi kebijakan sesuai dengan teori Edward III, sementara dalam penelitian milik Maliki teori Edward III digunakan sebagai satu-satunya teori untuk mengidentifikasi berjalannya implementasi kebijakan menggunakan empat buah variabel implementasi berdasarkan teori Edward III.

Penelitian kedua berusaha memecahkan persoalan implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah kota menggunakan teori Thompson yang mengemukakan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Sementara penelitian ini juga menggunakan teori Thompson sebagai *application theory*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Wibowo dan Rostyaningsih adalah dalam penelitian ini teori Thompson digunakan sebelum adanya proposal penelitian yaitu untuk menentukan klasifikasi aktor-aktornya terlebih dahulu sesuai dengan kekuatan dan kepentingannya masing-masing dan kemudian akan dipadukan dengan teori dan metode lainnya untuk menghasilkan jawaban dari penelitian ini, sementara dalam penelitian milik Wibowo dan Rostyaningsih teori Thompson dijadikan sebagai satu-satunya teori inti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ketiga berusaha mencari bentuk ideal dari sebuah operasionalisasi kerjasama menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Sementara penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy*

Process (AHP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Fauzela adalah penelitian ini menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikaitkan dengan subjek yaitu cara menentukan peran aktor paling dominan dalam menjalankan variabel implementasi kebijakan terkait kebijakan PPDB Zonasi agar dapat mencapai keberhasilan kebijakan tersebut bagi semua pihak dan tercapainya tujuan yang ada sebagai alasan kebijakan tersebut lahir. Sementara dalam penelitian milik Fauzela, *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dikaitkan dengan objek yaitu untuk menentukan bentuk kerjasama ideal antara pemerintah dan swasta.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

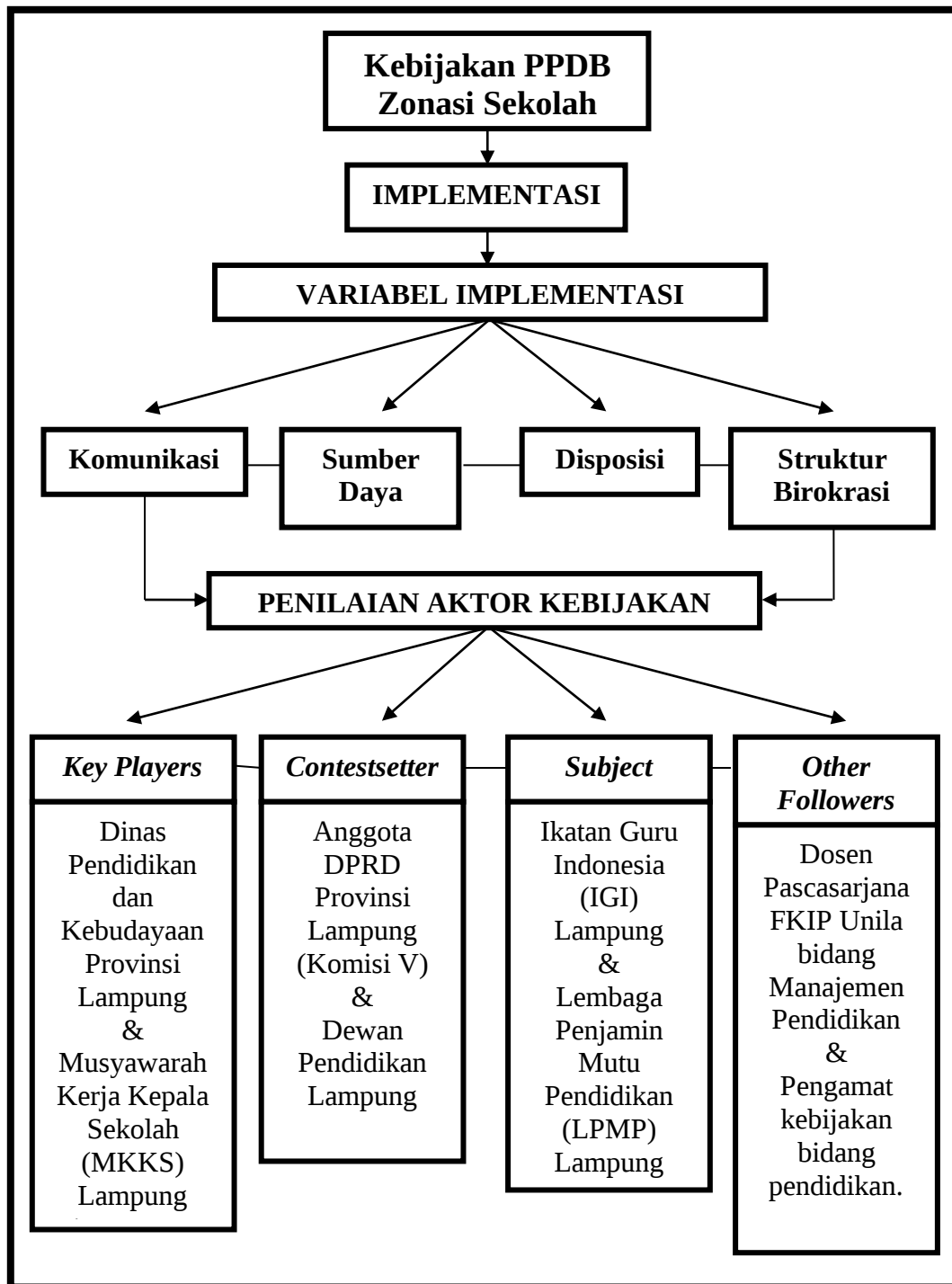
Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Dalam rangka mensukseskan kebijakan PPDB Zonasi, implementasi kebijakan merupakan hal penting yang harus dijadikan perhatian agar tidak ada kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan kebijakan ini. Dalam sebuah implementasi kebijakan, peran aktor menjadi hal paling krusial sebab para aktor adalah subjek yang akan menjalankan prosedur implementasi.

Dalam penelitian ini implementasi kebijakan akan dibahas berdasarkan teori Van Meter Van Horn (1975) sebagai *grand theory* Selanjutnya, melengkapi teori Horn mengenai implementasi kebijakan publik peneliti menggunakan teori George Edward III (1990) yang menjelaskan empat variabel implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel ini akan menjadi standar penilaian tentang bagaimana implementasi kebijakan dijalankan oleh seorang aktor. Teori George Edward III menjadi *middle theory* dalam penelitian ini.

Sebagai penutup dari kerangka pikir, *application theory* dalam penelitian ini menggunakan teori (Thompson, 1967). Setelah berbicara mengenai kriteria penilaian di *middle theory*, pembahasan menurun ke arah aktor implementasi

kebijakan publik. Thompson dalam teorinya membagi aktor kebijakan publik ke dalam empat golongan yang kemudian peneliti isi golongan-golongan tersebut sesuai dengan kriteria responden dan peneliti ringkas sebagai berikut;

- a. Aktor dengan kekuatan tinggi dan kepentingan tinggi (*key players*) yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung.
- b. Aktor dengan kekuatan tinggi dan kepentingan rendah (*contestsetters*) yaitu anggota DPRD Provinsi Lampung (Komisi V) dan Dewan Pendidikan Lampung.
- c. Aktor dengan kekuatan rendah dan kepentingan tinggi (*subject*) yaitu Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung.
- d. Aktor dengan kekuatan rendah dan kepentingan rendah (*other followers*) yaitu Mantan Dekan FKIP Unila sekaligus Dosen Pascasarjana FKIP Unila bidang Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan bidang pendidikan.



Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian.

Sumber: diolah peneliti, 2021

2.6 Hipotesis

Penelitian ini berfokus pada peran aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Pengolahan data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang mana akan terdapat fokus, kriteria dan alternatif. Tiap alternatif akan diuji dengan cara disandingkan dengan masing-masing kriteria menggunakan perhitungan dan rumus khusus *Analytical Hierarchy Process* (AHP) kemudian akan menghasilkan jawaban hierarki kepentingan peran masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

Validasi atau kebenaran hasil perhitungan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat dilihat pada bagian *Eigen Vector* dari keseluruhan elemen yang diuji berjumlah 1,00 dan *Consistency Ratio* (CR) yang nilainya $\leq 0,10$. Apabila hasil *Eigen Vector* dari keseluruhan elemen yang diuji berjumlah 1,00 berarti tidak ada perhitungan yang salah dan apabila *Consistency Ratio* (CR) $\leq 0,10$ berarti data bersifat konsisten dan perhitungan dapat dilanjutkan sampai menemukan hasil akhir berupa hierarki elemen yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini hasil akhir yang diharapkan berupa hierarki kepentingan peran aktor implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

Dugaan awal, peran paling penting aktor sesuai dengan variabel implementasi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tertuju pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung karena keduanya tergolong ke dalam kelompok aktor yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi. Peringkat selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Dewan Pendidikan Lampung dimana kedua aktor ini termasuk ke dalam kategori aktor dengan kekuatan tinggi dan kepentingan rendah.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung menduduki posisi selanjutnya karena kedua aktor ini memiliki kekuatan rendah dan kepentingan tinggi. Dosen

Pascasarjana Manajemen Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pendidikan berada di hierarki paling bawah sebab kedua aktor ini termasuk aktor dalam kategori kekuatan rendah dan kepentingan rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode *Analytical Hirarchy Process* (AHP), didapat *eigen vector* dari masing-masing aktor implementasi kebijakan sebagai berikut;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung: 0,18.
2. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung: 0,16.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung: 0,13.
4. Dewan Pendidikan Lampung: 0,13.
5. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung: 0,11.
6. Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung: 0,10.
7. Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan: 0,09.
8. Pengamat Kebijakan Pendidikan: 0,09.

Data diatas membuktikan bahwa adanya keselarasan antara hipotesis atau dugaan awal dan hasil akhir dalam penelitian ini. Hipotesis dibangun berdasarkan teori Thompson yang membagi aktor sesuai dengan kelompok tinggi rendahnya kekuatan dan kepentingannya sehingga menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung berada di hierarki paling tinggi kemudian Dosen Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan pendidikan berada di hierarki paling rendah. Hasil perhitungan dengan metode *Analytical Hirarchy Process* (AHP) membuktikan bahwa hipotesis memiliki kesamaan dengan data yang ada di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses panjang (Bungin, 2011). Penelitian mengenai peran aktor dalam implementasi kebijakan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif (Kirk, 1986). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam metode ini memiliki dasar-dasar filosofis yaitu fenomenologis artinya kebenaran dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena yang memancar dari objek yang diteliti dan interaksi simbolik sebagai dasar kajian sosial dan digunakan dalam penelitian kualitatif (Fuad, 2014).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015). Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: penentuan peran aktor kebijakan dan interaksinya terlebih dahulu ditentukan melalui proses wawancara yang hasilnya menjadi data yang kemudian kelengkapan data untuk diolah lebih lanjut prosesnya menggunakan metode kuesioner. Data dari kuesioner selanjutnya diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan hasil dari pengolahan tersebut dianalisis kembali serta dibuktikan kebenarannya dengan keadaan di lapangan.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dan subjek penelitian adalah para aktor yang terlibat dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yang dalam penelitian ini para aktor tersebut juga berperan sebagai informan penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni:

3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara. Argumen peneliti memilih wawancara sebagai sumber data primer sebab penelitian diawali dengan menentukan peran aktor dan proses interaksinya dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, data untuk menjawab pertanyaan tersebut didapatkan melalui metode observasi terlebih dahulu. Hasil wawancara kemudian dijadikan data utama dalam proposal penelitian dan untuk menindaklanjuti data awal maka peneliti menggunakan kuesioner sebagai metode untuk mendapatkan tambahan sebab pengolahan data selanjutnya menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa: wawancara dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi tiap aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Hasil perhitungan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) selanjutnya dibuktikan dengan fenomena dan kenyataan yang terjadi di lapangan melalui observasi atau pengamatan dan dijelaskan kembali secara mendetail bagaimana bentuk konkrit dari peran masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Penentuan informan secara sengaja dengan memilih informan berdasarkan kategori *expert power* yaitu informan dengan kecakapan dan keahlian tinggi dalam bidang yang dikaji sebab data dari informan nantinya akan diolah melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) membutuhkan informan yang benar-benar mengerti akan bidang yang dikaji, sebab jawaban informan akan diperhitungkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan. Informan kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kekuatan dan kepentingan masing-masing dalam bidang implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah sesuai dengan teori (Thompson, 1967), informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5. Informan Penelitian

Klasifikasi Aktor		Aktor	Argumen	
Kekuatan	Kepentingan			
Key Players				
Tinggi	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung & Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung	Kekuatan: keberadaannya diakui dan dinilai sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat daerah, perannya aktif dan sangat dibutuhkan, ide dan perintahnya sangat berpengaruh dalam jalannya implementasi kebijakan. Kepentingan: memiliki kepentingan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dan direalisasikan di daerah.	Partisipasi: sebagai <i>Leader Sector</i> atau coordinator. Perspektif: meminimalisir kesalahan dalam setiap pelaksanaan. Aksesibilitas: mudah, dengan memberikan aturan yang mudah diakses seluruh elemen terkait. Tindakan: secara matang dan berkoordinasi (rasional instrumental)
Contest Setter		DPRD Provinsi Lampung & Dewan Pendidikan Lampung <td rowspan="2">Kekuatan: sebagai pembantu utama pemain kunci, memiliki kekuatan mengatur dan merealisasikan ide dan menganalisis permasalahan dan solusi juga mengawasi implementasi suatu kebijakan. Kepentingan: kepentingannya rendah sebab tanggung jawab keberhasilan kebijakan ini bukan sepenuhnya berada pada aktor ini, namun aktor ini dipercaya masyarakat untuk terlibat dan membantu keberhasilan sebuah kebijakan demi kesejahteraan bersama.</td> <td rowspan="2">Partisipasi: sebagai pelaksana teknis rekan pemain kunci.. Perspektif: kemampuan memahami kebijakan berbeda-beda. Aksesibilitas: mudah, informasi milik publik dan melalui sosialisasi. Tindakan: mencari akar permasalahan dan penyelesaian.</td>	Kekuatan: sebagai pembantu utama pemain kunci, memiliki kekuatan mengatur dan merealisasikan ide dan menganalisis permasalahan dan solusi juga mengawasi implementasi suatu kebijakan. Kepentingan: kepentingannya rendah sebab tanggung jawab keberhasilan kebijakan ini bukan sepenuhnya berada pada aktor ini, namun aktor ini dipercaya masyarakat untuk terlibat dan membantu keberhasilan sebuah kebijakan demi kesejahteraan bersama.	Partisipasi: sebagai pelaksana teknis rekan pemain kunci.. Perspektif: kemampuan memahami kebijakan berbeda-beda. Aksesibilitas: mudah, informasi milik publik dan melalui sosialisasi. Tindakan: mencari akar permasalahan dan penyelesaian.
Tinggi	Rendah			

Tabel 5 (lanjutan)

<i>Subject</i>				
Rendah	Tinggi	Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung & Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung	Kekuatan: tidak begitu dominan sebab tidak memiliki hak dan kebebasan dalam menyalurkan ide ataupun berkomentar terkait bagaimana implementasi sebuah kebijakan berjalan. Kepentingan: sangat tinggi, sebab kualitas hasil dari kebijakan yang sedang diimplementasikan menjadi tanggung jawab aktor ini. Aktor ini memiliki kepentingan mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas melalui kebijakan yang sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah pusat. Aktor ini bebas dalam melakukan pengawasan.	Partisipasi: berkomunikasi dengan membentuk aliansi guna mencapai tujuan organisasi. Perspektif: menciptakan kualitas hasil kebijakan yang jauh lebih baik dari sebelum adanya kebijakan. Aksesibilitas: tidak bisa mengatur secara detail (hanya sebagai pengawas dan pelaksana). Tindakan: menjamin kualitas hasil implementasi kebijakan dan pengawasan.
<i>Other followers</i>				
Rendah	Rendah	Dosen Pascasarjana FKIP Unila bidang Manajemen Pendidikan & Pengamat Kebijakan Pendidikan	Kekuatan: sebagai pihak eksternal dengan keahlian tinggi namun memiliki aksesibilitas terbatas hanya dalam hal pengawasan, pengamatan dan perbaikan. Kepentingan: tidak begitu berpengaruh terhadap pribadi aktor sebab aktor ini sama sekali tidak memiliki tanggung jawab dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan yang sedang dikaji.	Partisipasi: keahlian tinggi terhadap pemahaman kebijakan. Perspektif: terjadi pro kontra dalam menilai implementasi kebijakan. Aksesibilitas: terbatas tidak bisa mengatur sepenuhnya. Tindakan: memahami, mengamati dan menilai.

Sumber: Diolah peneliti, 2021

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama adalah kuesioner dan peneliti sendiri. Instrumen penelitian tambahan adalah *handphone*.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara dan Kuisisioner

Penelitian diawali dengan mewawancarai perwakilan informan terkait tupoksi masing-masing informan terhadap implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah untuk membagi informan ke dalam empat kelompok menurut teori Thompson. Selanjutnya, pengumpulan data utama menggunakan metode kuesioner dengan hasil berupa data awal yang belum diolah. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan kuesioner, analisis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara (Sugiyono, 2015)

Alasan peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara adalah untuk melengkapi kriteria pengelompokan informan dan alasan peneliti menggunakan kuesioner adalah metode pengolahan data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) membutuhkan data berupa kisaran nilai dalam bentuk angka yang selanjutnya akan diolah menggunakan rumus khusus *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Selain itu, kuesioner dapat diberikan secara serempak kepada banyak responden sehingga responden dapat menjawab di waktu yang bersamaan, tidak membutuhkan banyak penjelasan dari responden sehingga responden merasa lebih tenang dan tanpa tekanan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kuesioner juga dapat dibuat berstandar

sehingga semua responden dapat diberi batasan dalam menjawab agar data hasil kuesioner tidak meluas dari fokus.

3.6.2 Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi menjadi observasi partisipan (*participant observation*), partisipasi non-partisipan (*non-participant observation*) dan observasi terhadap objek (Widi, 2010). Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak di dalam kuisisioner. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-kuisisioner sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan membuktikan bahwa hasil perhitungan selaras dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Proses Hirerarki Analisis yaitu sebagai berikut:

3.7.1 *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai set alternatif (Sasongko dkk., 2017). Analisis ini ditunjukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*) maupun pada situasi

yang kompleks atau tidak terkerangka. Sistem penunjang keputusan bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi (Hilda AM, 2015).

Beberapa teknik pengambilan keputusan di gunakan dalam analisis kebijakan. Pada hakekatnya AHP merupakan suatu model pengambil keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam model pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model- model sebelumnya. AHP juga memungkinkankestruktur suatu sistem dan lingkungan kedalam komponen saling berinteraksi dan kemudian menyatukan mereka dengan mengukur dan mengatur dampak dari komponen kesalahan sistem (L. T. Saaty, 1993).

3.7.1.1 Definisi *Analitical Hierarchy Process*(AHP)

Metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) adalah metode pendukung keputusan yang akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saaty, hierarki didefinisikan menjadi suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki suatu masalah kompleks dapat diuraikan menjadi kelompok- kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan menjadi terstruktur dan sistematis (L. T. Saaty, 1993).

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
- b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
- c. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan (Hartono, 2013).

Penggunaan AHP dapat diaplikasikan untuk keperluan individu terutama untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. AHP dapat diandalkan karena dalam AHP suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisi (struktur) terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur (hirarki) dan masuk akal (Fitriyani dan Ellya Hemud, 2016).

Jadi pada intinya AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menyusun suatu hirarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas (kesimpulan). Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub – sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki (Wibowo, 2015).

3.7.1.2 Prosedur *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Saaty, yaitu: *Decomposition*, *Comparative Judgement*, dan *Logical Consistency*. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut (Irawan, 2018):

a. Dekomposisi masalah

Dekomposisi masalah adalah langkah dimana suatu tujuan (*Goal*) yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis kedalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh, didekomposisi (dipecahkan) kedalam unsur penyusunnya.

b. Penilaian/pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen

Apabila proses dekomposisi telah selesai dan hirarki telah tersusun dengan baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan (pembobotan) pada tiap-tiap hirarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya.

c. Penyusunan matriks dan uji konsistensi

Apabila proses pembobotan atau pengisian kuisioner telah selesai, langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hirarkinya masing-masing. Pada tahapan ini analisis dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan program komputer seperti *Expert Choice*.

d. Penetapan prioritas pada masing-masing hirarki

Perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.

e. Sistesis dari prioritas

Sistesis dari prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hirarki sesuai dengan kriterianya.

f. Pengambilan/penetapan keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses dimana alternatif-alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriterianya.

3.7.1.3 Kelemahan dan Kelebihan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam system analisisnya (Chamid, 2017). Kelebihan-kelebihan analisis ini adalah :

- a. Kesatuan (*Unity*) AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kompleksitas (*Complexity*) AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.
- b. Saling ketergantungan (*Inter Dependence*) AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier.
- c. Struktur Hirarki (*Hierarchy Structuring*) AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.
- d. Pengukuran (*Measurement*) AHP menyediakan skala

pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.

- e. Konsistensi (*Consistency*) AHP mempertimbangkan konsistensi logis yang digunakan untuk menentukan prioritas.
- f. Sintesis (*Synthesis*) AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.
- g. *Trade Off* AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.
- h. Penilaian dan Konsensus (*Judgement and Consensus*) AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda.
- i. Pengulangan Proses (*Process Repetition*) AHP membuat orang menyaring definisi suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian dari pengertian melalui proses pengulangan.

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
- b. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.

3.7.2 Tahapan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Munthafa dan Mubarak, 2017) :

3.7.2.1 Mendefinisikan Masalah dan Menentukan Solusi

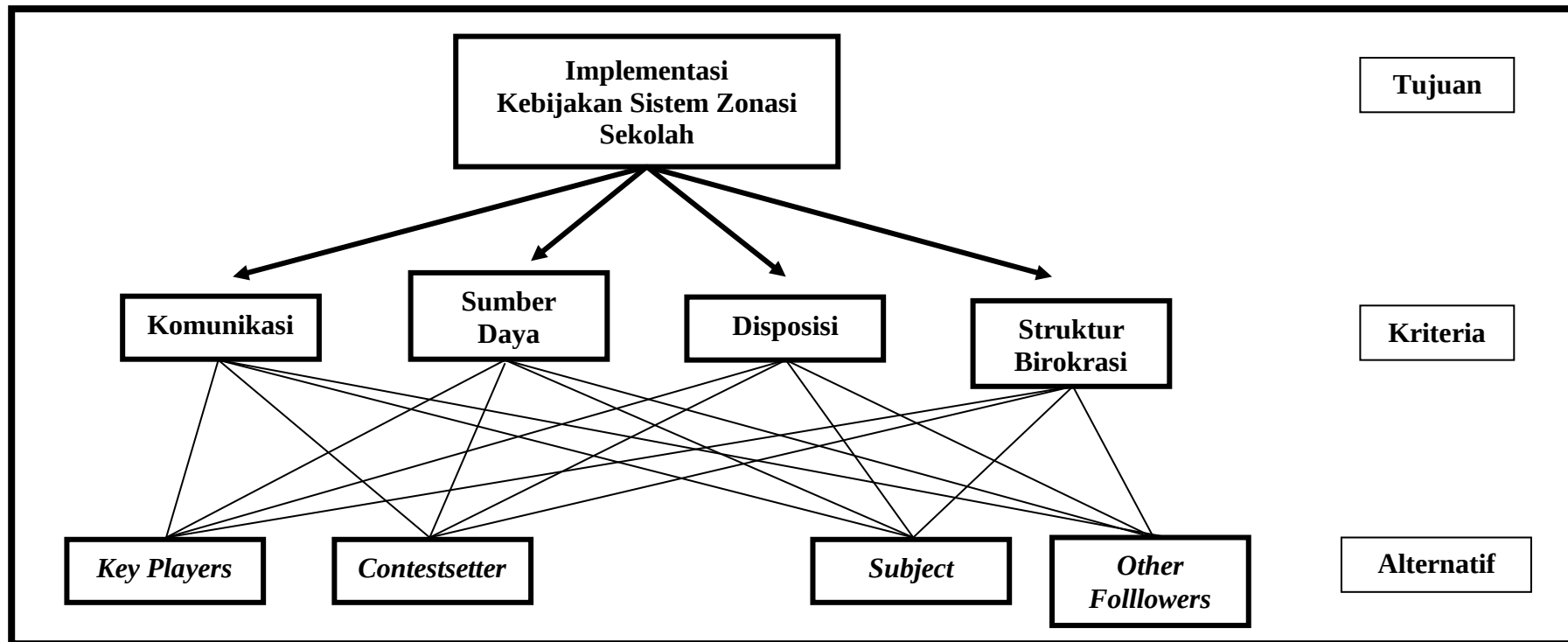
Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok

bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.

Berawal dari permasalahan kurang meratanya akses dan mutu pendidikan di Indonesia maka lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 Tahun 2019 yang menurunkan sebuah kebijakan bernama Sistem Zonasi Sekolah. Dalam menjalankan kebijakan terdapat variabel implementasi dan aktor implementasi yang terlibat. Penelitian ini berusaha mencari hierarki kepentingan peran aktor implementasi berdasarkan variabel implementasi dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi.

3.7.2.2 Membuat Struktur Hirarki yang Diawali dengan Tujuan Utama

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Berikut adalah struktur hiarki penelitian:



Gambar 3 Struktur Hierarki Dalam Penelitian.

Sumber: diolah peneliti, 2021

Keterangan:

- a. Tingkat 1 : *Goal* / Fokus adalah apa yang menjadi permasalahan yang ingin dipecahkan melalui AHP. Dalam hal ini yang ingin dipecahkan adalah variabel implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.
- b. Tingkat 2 : Kriteria adalah hal-hal yang menjadi kriteria dari fokus. Dalam gambar di atas kriteria aktor yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
- c. Tingkat 3 : Alternatif berupa golongan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yaitu golongan *key player*, *contestsetter*, *subject*, dan *other followers*.

3.7.2.3 Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks ini menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.

Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan Dalam Penelitian

	Komunikasi (1)	Sumber Daya (2)	Disposisi (3)	Struktur Birokrasi (4)
<i>Key Players</i> (a)	1a	2a	3a	4a
<i>Contentsetter</i> (b)	1b	2b	3b	4b
<i>Subject</i> (c)	1c	2c	3c	4c
<i>Other Followers</i> (d)	1d	2d	3d	4d

Sumber: diolah peneliti, 2021

3.7.2.4 Mendefinisikan Perbandingan Berpasangan

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan perbandingan berpasangan dan maknanya sebagai berikut:

Tabel 7. Skala Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen menyumbangannya sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya	Pengalaman atau pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting ketimbang elemen yang lainnya	Pengalaman atau pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang elemen yang lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara duapertimbangan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikan nya bila dibandingkan dengan i	

Sumber : (Oktafianto dkk., 2018)

3.7.2.5 Menghitung Nilai Eigen dan Menguji Konsistensinya

Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.

3.7.2.6 Mengulangi langkah 3,4, dan 5

Untuk seluruh tingkat hirarki.

3.7.2.7 Menghitung Vektor Eigen dari Setiap Matriks Perbandingan Berpasangan

Hal ini merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang berbentuk (Amarullah dan Simanjorang, 2020):

$$“(A)(w^T) = (n)(w^T)”$$

dapat didekati dengan cara:

a. Menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sedemikian hingga:

$$“\sum a(i,j) i=1”$$

sebut sebagai A'.

Makadalam penelitian ini dihasilkan data sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Normalisasi Kriteria: Variabel Implementasi

Kriteria: Variabel Implementasi	Jumlah Normalisasi
Komunikasi	0,91
Sumber Daya	1,06
Disposisi	0,85
Struktur Birokrasi	1,18
JUMLAH	4,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 9. Jumlah Normaliasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	1,44
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	1,33
DPRD	0,95
Dewan Pendidikan Lampung	0,99
Ikatan Guru Indonesia	0,83
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,90
Dosen Manajemen Pendidikan	0,75
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,81
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 10. Jumlah Normaliasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	1,70
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	1,34
DPRD	0,98
Dewan Pendidikan Lampung	0,95
Ikatan Guru Indonesia	0,84

Tabel 10 (lanjutan)

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,88
Dosen Manajemen Pendidikan	0,68
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,64
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 11. Jumlah Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	1,25
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	1,05
DPRD	1,08
Dewan Pendidikan Lampung	1,07
Ikatan Guru Indonesia	0,97
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,92
Dosen Manajemen Pendidikan	0,92
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,73
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 12. Jumlah Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	1,47
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	1,30
DPRD	1,07
Dewan Pendidikan Lampung	1,22
Ikatan Guru Indonesia	0,74
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,77
Dosen Manajemen Pendidikan	0,70
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,73
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

b. Hitung nilai rata-rata untuk setiap baris i dalam A' :

$$w_i = 1/n \sum_j a(i,j)$$

dengan: w_i adalah bobot tujuan ke- i dari vektor bobot (Amarullah dan Simanjorang, 2020).

Makadalam penelitian ini dihasilkan data sebagai berikut:

Tabel 13. Rata-rata Normalisasi Kriteria: Variabel Implementasi

Kriteria: Variabel Implementasi	Rata-rata Normalisasi
Komunikasi	0,23
Sumber Daya	0,26
Disposisi	0,21
Struktur Birokrasi	0,30
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 14. Rata-rata Normalisasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,18
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	0,17
DPRD	0,12
Dewan Pendidikan Lampung	0,12
Ikatan Guru Indonesia	0,10
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,11
Dosen Manajemen Pendidikan	0,09
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,10
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 15. Rata-rata Normaliasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,21
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	0,17
DPRD	0,12
Dewan Pendidikan Lampung	0,12
Ikatan Guru Indonesia	0,10
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,11
Dosen Manajemen Pendidikan	0,08
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,08
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 16. Rata-rata Normaliasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,16
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	0,13
DPRD	0,13
Dewan Pendidikan Lampung	0,13
Ikatan Guru Indonesia	0,12
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,12
Dosen Manajemen Pendidikan	0,12
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,09
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 17. Rata-rata Normaliasi Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,18
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	0,16
DPRD	0,13
Dewan Pendidikan Lampung	0,15
Ikatan Guru Indonesia	0,09
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,10
Dosen Manajemen Pendidikan	0,09
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,09
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

3.7.2.8 Memeriksa Konsistensi Hirarki

Tahapan ini diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Misal A adalah matriks perbandingan berpasangan dan w adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji (T. L. Saaty, 2004).

a. Hitung: $(A)(w^T)$ atau λ maksimal:

$$t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{elemen ke-i pada } (A)(W^T)}{\text{elemen ke-i pada } W^T} \right)$$

Maka dalam penelitian ini dihasilkan data sebagai berikut:

Tabel 18. Lamda Maksimal (t) tiap Elemen

Elemen	Lamda Maksimal (t)
Kriteria: Variabel Implementasi	4,12
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi	8,95
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	8,97
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	8,91
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	8,67

Sumber: Diolah peneliti, 2021

b. Hitung indeks konsistensi:

$$CI = \frac{t - n}{n - 1}$$

Di mana:

- CI = Rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi (*consistency index*)
- Maks = *eigen value maksimum* λ
- n = ukuran matriks

Tabel 19. Consistency Index (CI) tiap Elemen

Elemen	Consistency Index (CI)
Kriteria: Variabel Implementasi	0,04
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi	0,14
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	0,14

Tabel 19 (lanjutan)

Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	0,13
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	0,10

Sumber: Diolah peneliti, 2021

c. Indeks random (Tabel IR) adalah satuan nilai berbeda tergantung banyaknya n (elemen) (T. L. Saaty, 2004) diberikan sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8
0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41

d. Hitung rasio konsistensi

$$CR = \frac{CI}{RI_n}$$

Jika $CI = 0$, maka hierarki konsisten. Jika $CR \leq 0,1$, maka hierarki cukup konsisten. Jika $CR \geq 0,1$, maka hierarki sangat tidak konsisten.

Tabel 20. Consistency Ratio (CR) tiap Elemen

Elemen	Consistency Index (CI)
Kriteria: Variabel Implementasi	0,04
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi	0,10
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	0,10
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	0,09
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	0,07

Sumber: Diolah peneliti, 2021

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung mulai menerapkan seluruh SMA di Lampung menggunakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, sistem zonasi masing-masing SMA berdasarkan kuota dan ketentuan siswa. PPDB SMA berdasarkan sistem zonasi di Lampung mulai Senin 17 Juni 2019 hingga Rabu 19 Juni 2019. Hasilnya diumumkan pada 20 Juni 2019, dan daftar ulang pada 20-22 Juli 2019. Sedangkan Masa Pengenalan Lingkungan Siswa (MPLS) pada 15-17 Juli 2019. Sedangkan awal proses belajar mengajar di sekolah mulai 15 Juli 2019 (Republika, 2019).

Sistem PPDB zonasi tingkat SMA di Lampung dapat dilakukan dengan cara online dan datang langsung ke SMA yang dituju. Sistem zonasi PPDB tingkat SMA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019. Mengacu peraturan tersebut, sistem PPDB berdasarkan sistem zonasi sebanyak 80 persen, prestasi (15 persen), dan perpindahan tugas orang tua/wali (5 persen). Sistem PPDB berdasarkan zonasi untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memilih sekolah berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Warga negara bebas menentukan sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif.

Selain menerima peserta didik baru berdasarkan zonasi, PPDB yang menggunakan sistem online tersebut menampung siswa berprestasi secara berjenjang, perpindahan tugas orang tua, dan mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. Tujuan dari PPDB sistem zonasi untuk mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan bagi warga negara sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan, dan relevansi daya saing pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang baik. Penerimaan siswa baru lewat sistem zonasi diharapkan dapat berlangsung secara obyektif, transparan, dan akuntabel, serta tidak diskriminatif. Sehingga tujuan pemerataan dan kualitas pendidikan dapat tercapai.

4.2 Zona Kecamatan Kebijakan Sistem Zonasi Tingkat SMA di Provinsi Lampung

Sebagai bagian dari Indonesia, Provinsi Lampung yang memiliki 15 Kabupaten/Kota dengan cukup banyak sarana pendidikan dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD)/ sederajat hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. PPDB Zonasi hanya ditujukan untuk sekolah negeri milik pemerintah daerah, hal ini tentunya akan lebih mempersempit pilihan para calon siswa SMA di Provinsi Lampung untuk menentukan sekolah yang mereka inginkan berdasarkan sistem zonasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru dan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam hal PPDB Zonasi tingkat SMA negeri se-Provinsi Lampung maka tiap-tiap sekolah memiliki zonasi per-kecamatan yang berbeda.

4.2.1 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 21. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Natar	Kec. Natar, Jatiagung, Tegineneng, Rajabasa (bdl), Metro Kibang
2	SMAN 2 Natar	Kec. Natar, Jatiagung, Tegineneng, Rajabasa (bdl), Metro Kibang
3	SMAN 1 Jati Agung	Kec. Natar, Jatiagung, Tanjungsari, Sekampung Udik (lamtim)
4	SMAN 1 Tanjung Sari	Kec. Tanjungsari, Jatiagung, Tanjung Bintang, Sekampung Udik (lamtim)
5	SMAN 1 Tanjung Bintang	Kec. Tanjung Bintang, Tanjungsari, Merbau Mataram Panjang, Way Sulan
6	SMAN 1 Merbau Mataram	Kec. Merbau Mataram, Way Sulan, Katibung Tanjung Bintang, Panjang, Waway Karya
7	SMAN 1 Katibung	Kec. Katibung, Merbau Mataram, Sidomulyo, Panjang, Way Sulan
8	SMAN 1 Way Sulan	Kec. Way Sulan, Merbau Mataram, Candipuro, Waway Karya
9	SMAN 1 Candipuro	Kec. Candipuro, Sidomulyo, Way Panji, Katibung, Jabung
10	SMAN 1 Sidomulyo	Kec. Sidomulyo, Kalianda, Katibung, Candipuro Way Panji
11	SMAN 1 Kalianda	Kec. Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Penengahan
12	SMAN 2 Kalianda	Kec. Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Penengahan
13	SMAN 1 Penengahan	Kec. Penengahan, Palas, Ketapang, Rajabasa
14	SMAN 1 Palas	Kec. Palas, Sragi, Penengahan, Way Panji
15	SMAN 1 Sragi	Kec. Sragi, Palas, Ketapang, Way Panji, Pasir Sakti
16	SMAN 1 Rajabasa	Kec. Rajabasa, Kalianda, Penengahan, Baauheni
17	SMAN 1 Ketapang	Kec. Ketapang, Penengahan, Bakauheni, Sragi, Pasir Sakti
18	SMAN 1 Bakauheni	Kec. Bakauheni, Ketapang, Penengahan, Rajabasa

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.2 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 22. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Bandar Surabaya	Kec. Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Bumi Nabung
2	SMAN 1 Seputih Surabaya	Kec. Seputih Surabaya, Rumbia, Bumi Nabung, Bandar Surabaya
3	SMAN 1 Rumbia	Kec . Rumbia, Putra Rumbia, Seputih Surabaya
4	SMAN 1 Bumi Nabung	Kec. Bumi Nabung, Rumbia, Seputih Surabaya
5	SMAN 1 Way Seputih	Kec. Way Seputih, Seputih Banyak, Bandar Mataram, Bumi Nabung, Seputih Mataram
6	SMAN 1 Seputih Banyak	Kec. Seputih Banyak, Seputih Raman, Way Seputih
7	SMAN 1 Seputih Raman	Kec. Seputih Mataram, Seputih Raman, Bandar Mataram, Terbanggi Besar
8	SMAN 1 Kota Gajah	Kec. Kota Gajah, Punggur, Seputih Raman
9	SMAN 1 Punggur	Kec. Punggur, Kota Gajah, Trimurjo
10	SMAN 1 Trimurjo	Kec. Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Punggur
11	SMAN 1 Gunung Sugih	Kec. Gunung Sugih, Bumiratu Nuban, Bekri
12	SMAN 1 Anak Tuha	Kec. Anak Tuha, Gunung Sugih, Padang Ratu, Seputih Agung
13	SMAN 1 Padang Ratu	Kec. Padang Ratu, Selagai Lingga, Pubian, Anak Tuha, Kalirejo
14	SMAN 1 Pubian	Kec. Pubian, Selagai Lingga, Sendang Agung, Padang Ratu
15	SMAN 1 Bandar Mataram	Kec. Bandar Mataram, Seputih Mataram, Terbanggi Besar
16	SMAN 1 Seputih Mataram	Kec. Seputih Mataram, Seputih Raman, Bandar Mataram, Terbanggi Besar
17	SMAN 1 Terbanggi Besar	Kec. Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Seputih Agung, Seputih Mataram, Way Pengubuan
18	SMAN 1 Terbanggi Agung	Kec. Seputih Agung, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Anak Tuha
19	SMAN 1 Terusan Nunyai	Kec. Terusan Nunyai, Terbanggi Besar, Way Pengubuan, Seputih Mataram
20	SMAN 1 Anak Ratu Aji	Kec. Anak Ratu Aji, Way Pengubuan, Selagai Lingga, Pubian
21	SMAN 1 Way Pengubuan	Kec. Way Pengubuan, Anak Ratu Aji, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai

Tabel 22. (lanjutan)

22	SMAN 1 Kalirejo	Kec. Kalirejo, Selagai Lingga, Bangun Rejo, Sendang Agung, Padang Ratu
23	SMAN 1 Bangun Rejo	Kec. Bangun Rejo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Kalirejo
24	SMAN 1 Sendang Agung	Kec. Sendang Agung, Selagai Lingga, Kalirejo, Pubian

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.3 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara

Tabel 23. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung kunang, Abung Timur
2	SMAN 2 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Sungkai Jaya, Abung Timur, Bunga Mayang, Sungkai Selatan
3	SMAN 3 Kota Bumi	Kec . Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
4	SMAN 4 Kota Bumi	Kec. Kotabumi Selatan, Kotabumi Kota, Abung Selatan, Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Timur
5	SMAN 1 Bukit Kemuning	Kec. Bukit kemuning, Abung Tinggi, Gunung Labuhan, Sumber Jaya, Tanjung Raja
6	SMAN 1 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukit Kemuning

Tabel 23. (lanjutan)

7	SMAN 2 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raja, Abung Tinggi, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Bukit Kemuning
8	SMAN 1 Abung Tinggi	Kec. Bukit Kemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Sungkai Barat
9	SMAN 1 Abung Barat	Kec. Abung Barat, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Tengah, Abung Kunang, Sungkai Jaya
10	SMAN 1 Abung Tengah	Kec. Abung Tengah, Abung Barat, Abung Kunang, Abung Pekurun, Tanjung Raja
11	SMAN 1 Abung Kunang	Kec. Abung Kunang, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Pekurun, Kotabumi Kota, Sungkai Jaya, Kotabumi Selatan
12	SMAN 1 Abung Pekurun	Kec. Abung Pekurun, Abung Kunang, Abung Tengah, Kotabumi Selatan, Selagai Lingga (Iamteng), Tanjung Raja
13	SMAN 1 Abung Semuli	Kec. Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
14	SMAN 2 Abung Semuli	Kec. Abung Semuli, Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Timur, Blambangan Pagar, Way Pengubuan
15	SMAN 1 Abung Selatan	Kec. Abung Selatan, Abung Semuli, Kotabumi Kota, Blambangan Pagar, Abung Timur, Kotabumi Selatan, Anak Ratu Aji, Way Pengubuan
16	SMAN 1 Abung Timur	Kec. Abung Timur, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Selatan, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Muara Sungkai, Bunga Mayang
17	SMAN 1 Sungkai Jaya	Kec. Sungkai Jaya, Kotabumi Kota, Kotabumi Utara, Abung Barat, Abung Kunang, Sungkai Barat, Sungkai Selatan
18	SMAN 1 Sungkai Utara	Kec. Sungkai Utara, Bunga Mayang, Hulu Sungkai, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah
19	SMAN 1 Sungkai Selatan	Kec. Sungkai Selatan, Kotabumi Utara, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Bunga Mayang
20	SMAN 1 Sungkai Barat	Kec. Sungkai Barat, Abung Barat, Sungkai Jaya, Abung Tinggi, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah

Tabel 23. (lanjutan)

21	SMAN Bakti Mulya	Kec. Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur
22	SMAN 1 Muara Sungkai	Kec. Muara Sungkai, Abung Timur, Abung Surakarta, Bunga Mayang, Tumijajar, Tulang Bawang Udik
23	SMAN 1 Hulu Sungkai	Kec. Hulu Sungkai, Sungkai Utara, Sungkai Tengah, Kec. Way Kanan
24	SMAN 1 Bunga Mayang	Kec. Bunga Mayang, Sungkai Utara, Kotabumi Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Abung Timur

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.4 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 24. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Liwa	Kec. Balik Bukit
2	SMAN 1 Sumber Jaya	Kec. Sumber Jaya
3	SMAN 1 Way Tenong	Kec. Way Tenong
4	SMAN 1 Belalau	Kec. Belalau
5	SMAN 1 Sekincau	Kec. Sekincau
6	SMAN 1 Sukau	Kec. Sukau
7	SMAN 2 Way Tenong	Kec. Way Tenong

Tabel 24. (lanjutan)

8	SMAN 1 Kebun Tebu	Kec. Kebun Tebu, Gedung Surian
9	SMAN 1 Bandar Negeri Suoh	Kec. Bandar Negeri Suoh, Suoh
10	SMAN 1 Batu Brak	Kec. Batu Brak
11	SMAN 2 Liwa	Kec. Balik Bukit
12	SMAN 1 Air Hitam	Kec. Air Hitam, Gedung Surian
13	SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa
14	SMAN 1 Lumbok Seminung	Kec. Lumbok Seminung
15	SMAN 1 Batu Ketulis	Kec. Batu Ketulis

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.5 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 25. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Banjar Agung	Kec. Banjar Agung, Gedung Aji
2	SMAN 1 Banjar Baru	Kec. Banjar Baru, Menggala Timur
3	SMAN 1 Banjar Margo	Kec. Banjar Baru

Tabel 25. (lanjutan)

4	SMAN 1 Dente Teladas	Kec. Dente Teladas
5	SMAN 2 Dente Teladas	Kec. Dente Teladas
6	SMAN 1 Gedung Aji	Kec. Gedung Aji, Merkasa Aji
7	SMAN 1 Gedung Aji Baru	Kec. Gedung Aji Baru
8	SMAN 1 Gedung Meneng	Kec. Gedung Meneng
9	SMAN 1 Menggala	Kec. Menggala
10	SMAN 2 Menggala	Kec. Menggala, Gedung Meneng
11	SMAN 3 Menggala	Kec. Menggala
12	SMAN 1 Merkasa Aji	Kec. Merkasa Aji
13	SMAN 1 Penawar Aji	Kec . Penawar Aji
14	SMAN 1 Penawar Tama	Kec. Penawar Tama
15	SMAN 1 Rawa Pitu	Kec. Rawa Pitu
16	SMAN 1 Rawajitu Selatan	Kec. Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.6 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tanggamus

Tabel 26. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tanggamus

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Semaka	Kec. Semaka, Bandar Negeri Semong, Wonosobo
2	SMAN 1 Wonosobo	Kec. Wonosobo, Semaka, Bandar Negeri Semoung, Kotaagung Barat
3	SMAN 1 Kota Agung	Kec. Kotaagung, Kotaagung Barat, Kotaagung Timur, Wonosobo, Bandar Negeri Semoung, Semaka
4	SMAN 2 Kota Agung	Kec. Kotaagung, Kotaagung Barat, Kotaagung Timur, Wonosobo, Bandar Negeri Semoung, Semaka
5	SMAN 1 Pematang Sawa	Kec. Semaka, Bandar Negeri Semoung, Wonosobo, Pematang Sawa
6	SMAN 1 Sumberejo	Kec. Sumberejo, Gisting, Gunung Alip, Ulu Belu, Pulau Panggung
7	SMAN 1 Talang Padang	Kec. Sumberejo, Gisting, Gunung Alip, Talang Padang, Pugung
8	SMAN 1 Pulau Panggur	Kec. Sumberejo, Talang Padang, Pulau Panggung, Air Naningan
9	SMAN 1 Air Naningan	Kec. Sumberejo, Pulau Panggung, Air Naningan
10	SMAN 1 Ulu Belu	Kec. Ulu Belu, Pulau Panggung, Sumberejo
11	SMAN 2 Ulu Belu	Kec. Ulu Belu
12	SMAN 1 Bulok	Kec. Bulok, Pardasuka, Pugung, Limau, Ambarawa
13	SMAN 1 Cukuh Balak	Kec. Cukuh Balak, Limau, Kelumbayan Barat
14	SMAN 1 Kelumbayan	Kec. Cukuh Balak, Limau, Kelumbayan, Kelumbayan Barat
15	SMAN 1 Kelumbayan Barat	Kec. Cukuh Balak, Limau, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Padang Cermin, Hanura
16	SMAN 1 Limau	Kec. Cukuh Balak, Limau, Bulok, Kotaagung Timur
17	SMAN 1 Gunung Alip	Kec. Gisting, Gunung Alip, Talang Padang, Sumberejo, Pugung, Kotaagung

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.7 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur

Tabel 27. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Sukadana	Kec. Sukadana, Margatiga, Purbolinggo, Bumi Agung
2	SMAN Marga Tiga	Kec. Marga Tiga, Bumi Agung, Sekampung, Sukadana
3	SMAN Pekalongan	Kec . Pekalongan, Sukaraja Nuban, Metro Utara, Punggur
4	SMAN 1 Purbolinggo	Kec. Purbolinggo, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana
5	SMAN 1 Raman Utara	Kec. Raman Utara, Batanghari Nuban, Purbolinggo, Seputih Banyak
6	SMAN 1 Way Bungur	Kec. Way Bungur, Purbolinggo, Sukadana, Seputih Banyak
7	SMAN 1 Batanghari	Kec. Batanghari, Sekampung, Metro Kibang, Metro Timur
8	SMAN 1 Kibang	Kec. Metro Kibang, Sekampung, Metro Selatan, Natar, Jati Agung
9	SMAN 1 Sekampung	Kec. Sekampung, Bumi Agung, Margatiga
10	SMAN 2 Sekampung	Kec. Sekampung, Batanghari, Margatiga, Kibang, Bumi Agung
11	SMAN 1 Way Jepara	Kec. Way Jepara, Braja Selehah, Labuhan Ratu, Mataram Baru
12	SMAN 1 Labuhan Ratu	Kec. Labuhan Ratu, Way Jepara, Sukadana, Braja Selehah
13	SMAN 1 Sekampung Udik	Kec. Sekampung Udik, Bandar Sribhawono, Marga Sekampung, Waway Karya, Tj. Bintang
14	SMAN 1 Jabung	Kec. Jabung, Marga Sekampung, Waway Karya, Candi Puro Lampung Selatan
15	SMAN 1 Way Karya	Kec. Waway Karya, Marga Sekampung, Jabung Sekampung Udik
16	SMAN 1 Bandar Sribawono	Kec. Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Sekampung Udik, Melinting
17	SMAN 1 Gunung Pelindung	Kec. Gunung Pelindung, Melinting, Pasir Sakti, Jabung
18	SMAN 1 Labuhan Maringgai	Kec. Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Braja Selehah

Tabel 27. (lanjutan)

19	SMAN 1 Melinting	Kec. Melinting, Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung
20	SMAN 1 Pasir Sakti	Kec. Pasir Sakti, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Seragi

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.8 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Way Kanan

Tabel 28. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Way Kanan

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Kasui	Kec. Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Blambangan Umpu
2	SMAN 2 Kasui	Kec. Kasui, Rebang Tangkas, Banjit, Blambangan Umpu
3	SMAN 1 Baradatu	Kec. Baradatu, Gunung Labuhan, Negeri Agung Banjit
4	SMAN 1 Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu, Kasui, Baradatu, Negeri Agung, Way Tuba
5	SMAN 2 Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu, Negeri Agung, Baradatu, Kasui
6	SMAN 1 Banjit	Kec. Banjit, Kasui, Baradatu, Gunung Labuhan
7	SMAN 2 Banjit	Kec. Banjit, Kasui, Baradatu, Gunung Labuhan
8	SMAN 1 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur

Tabel 28. (lanjutan)

9	SMAN 2 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
10	SMAN 1 Bumi Agung	Kec. Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung, Buay Madang Timur
11	SMAN 2 Bumi Agung	Kec. Bumi Agung Dan Buay Bahuga
12	SMAN 1 Negara Batin	Kec. Negara Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar
13	SMAN 2 Negara Batin	Kec. Negara Batin, Gunung Terang
14	SMAN 1 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu Dan Blambangan Umpu
15	SMAN 2 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Gunung Labuhan, Hulu Sungkai, Baradatu, Blambangan Umpu
16	SMAN 1 Negeri Besar	Kec. Negeri Besar
17	SMAN 2 Negeri Besar	Kec.Negeri Besar
18	SMAN 1 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Sungkai Utara
19	SMAN 2 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Baradatu, Bukit Kemuning, Sungkai Utara, Sungkai Barat, Sungkai Selatan
20	SMAN 1 Pakuan Ratu	Kec. Negara Batin, Pakuan Ratu
21	SMAN 1 Rebas Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kasui, perbatasan blambangan Umpu, Buay Pemancar
22	SMAN 2 Rebas Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kasui, perbatasan blambangan Umpu, Buay Pemancar
23	SMAN 1 Way Tuba	Kec. Way Tuba, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Kotabaru Selatan
24	SMAN 1 Gedung Harapan	Kec. Negeri Agung, Gunung Labuhan, Baradatu, Blambangan Umpu

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.9 Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Bandar Lampung

Tabel 29. Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Bandar Lampung

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Timur, Enggal, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Telukbetung Utara
2	SMAN 2 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Utara, Enggal, Kedaton, Teluk Betung Selatan
3	SMAN 3 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Utara, Enggal, Kedaton, Teluk Betung Selatan
4	SMAN 4 Bandar Lampung	Kec. Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, Enggal, Bumi Waras, Tanjungkarang Pusat
5	SMAN 5 Bandar Lampung	Kec. Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung
6	SMAN 6 Bandar Lampung	Kec. Panjang, Bumi Waras, Sukabumi, Kedamaian, Ketibung, Merbau Mataram
7	SMAN 7 Bandar Lampung	Kec. Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Teluk Betung Barat, Negeri Sakti
8	SMAN 8 Bandar Lampung	Kec. Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Barat
9	SMAN 9 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjung Karang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat
10	SMAN 10 Bandar Lampung	Kec. Teluk Betung Utara, Kedamaian, Enggal, Tanjungkarang Timur, Panjang, Bumi Waras, Way Halim, Sukarame, Sukabumi
11	SMAN 11 Bandar Lampung	Kec. Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Pandan
12	SMAN 12 Bandar Lampung	Kec. Sukarame, Way Halim, Tanjung Seneng, Sukabumi, Kedamaian, Jati Agung, Tanjung Bintang

Tabel 29. (lanjutan)

13	SMAN 13 Bandar Lampung	Kec. Rajabasa, Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Kemiling, Langkapura, Jati Agung, Natar
14	SMAN 14 Bandar Lampung	Kec. Kemiling, Tanjungkarang Barat, Langkapura, Rajabasa, Teluk Betung Barat, Natar, Negeri Sakti
15	SMAN 15 Bandar Lampung	Kec. Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Rajabasa, Way Halim, Sukarame, Jati Agung
16	SMAN 16 Bandar Lampung	Kec. Tanjungkarang Barat, Langkapura, Kemiling, Tanjungkarang Pusat, Kedaton, Labuhan Ratu, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat
17	SMAN 17 Bandar Lampung	Kec. Panjang, Sukabumi, Bumiwaras, Kedamaian, Merbau Mataram, Ketibung

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.10 Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Metro

Tabel 30. Zona Kecamatan setiap SMA di Kota Metro

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Metro	Kec. Metro Timur, Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Batang Hari, Pekalongan
2	SMAN 2 Metro	Kec. Metro Barat, Metro Selatan, Metro Pusat, Metro Timur, Trimurjo
3	SMAN 3 Metro	Kec. Metro Utara, Metro Pusat, Punggur, Kota Gajah, Trimurjo, Pekalongan
4	SMAN 4 Metro	Kec. Metro Timur, Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Batang Hari, Pekalongan

Tabel 30. (lanjutan)

5	SMAN 5 Metro	Kec. Metro Pusat, Metro Utara, Metro Barat, Metro Timur, Pekalongan, Trimurjo
6	SMAN 6 Metro	Kec. Metro Selatan, Metro Barat, Metro Timur, Metro Kibang, Batang Hari, Trimurjo

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.11 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesawaran

Tabel 31. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesawaran

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Gedong Tataan	Kec. Gedung Tataan, Kemiling, Gading Rejo, Negeri Katon, Way Lima
2	SMAN 2 Gedong Tataan	Kec. Gedung Tataan, Kemiling, Gading Rejo, Negeri Katon, Way Lima
3	SMAN 1 Kedondong	Kec. Kedondong
4	SMAN 1 Way Khilau	Kec. Way Khilau, Kedondong, Ambarawa, Pardasuka, Bulok
5	SMAN 1 Way Lima	Kec. Way Lima, Gading Rejo, Kedondong, Gedung Tataan
6	SMAN 1 Negeri Katon	Kec. Negeri Katon, Sukoharjo, Kalirejo, Adiluwih, Tegineneng
7	SMAN 2 Negeri Katon	Kec. Negeri Katon, Tegineneng, Natar
8	SMAN 1 Tegineneng	Kec. Tegineneng, Natar, Kegeri Katon, Adiluwih
9	SMAN 2 Tegineneng	Kec. Tegineneng, Natar, Adiluwih, Bangun Rejo, Bekri, Negeri Katon
10	SMAN 1 Padang Cermin	Kec. Teluk Pandan, Teluk Betung Timur, Padang Cermin
11	SMAN 2 Padang Cermin	Kec. Padang Cermin, Way Ratai, Kedondong, Kulumbayan Barat

Tabel 31. (lanjutan)

12	SMAN 1 Punduh Pedada	Kec. Punduh Pedada, Marga Punduh, Padang Cermin
13	SMAN 2 Punduh Pedada	Kec. Punduh Pedada, Marga Punduh, Kulumbayan

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.12 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Mesuji

Tabel 32. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Mesuji

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Panca Jaya, Way Serdang
2	SMAN 1 Tanjung Raya	Kec. Tanjung Raya, Mesuji Timur, Mesuji Lampung
3	SMAN 1 Way Serdang	Kec. Way Serdang, Simpang Pematang, Way Kenanga (Tubaba)
4	SMAN 1 Mesuji Timur	Kec. Mesuji Timur, Tanjung Raya
5	SMAN 1 Mesuji Lampung	Kec. Mesuji Lampung, Tanjung Raya, Mesuji (OKI Sumatera Selatan)
6	SMAN 2 Way Serdang	Kec. Way Serdang, Simpang Pematang
7	SMAN 2 Simpang Pematang	Kec. Simpang Pematang, Way Serdang, Mesuji (OKI Sumatera Selatan)
8	SMAN 1 Panca Jaya	Kec. Panca Jaya, Simpang Pematang, Tanjung Raya
9	SMAN 1 Rawa Jitu Utara	Kec. Rawa Jitu Utara, Rawa Jitu Selatan (Tuba)

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.13 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pringsewu

Tabel 33. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pringsewu

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Pringsewu	Kec. Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Ambarawa, Banyumas
2	SMAN 2 Pringsewu	Kec. Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Sukoharjo, Ambarawa, Banyumas
3	SMAN 1 Gadingrejo	Kec. Pringsewu, Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon, Ambarawa
4	SMAN 2 Gadingrejo	Kec. Pringsewu, Gadingrejo, Gedongtataan, Waylima, Negeri Katon, Ambarawa
5	SMAN 1 Ambarawa	Kec. Ambarawa, Gadingrejo, Pringsewu, Pardasuka, Bulok, Pagelaran
6	SMAN 1 Pagelaran	Kec. Pagelaran, Pringsewu, Pagelaran Utara, Pugung, Amabarawa, Bulok
7	SMAN 1 Sukoharjo	Kec. Sukoharjo, Pringsewu, Banyumas, Adiluwih, Kalirejo, Negeri Katon
8	SMAN 1 Adiluwih	Kec. Adiluwih, Sukoharjo, Kalirejo, Negeri katon, Tegineneng
9	SMAN 1 Banyumas	Kec. Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara, Sukoharjo, Pringsewu
10	SMAN 1 Pardasuka	Kec. Pardasuka, Ambarawa, Bulok, Way Rilau, Kedongdong, Limau

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.14 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 34. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta
2	SMAN 2 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta, Terusan Nunyai
3	SMAN 3 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta
4	SMAN 4 Tumijajar	Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta, Terusan Nunyai
5	SMAN 1 Tulang Bawang Udik	Kec. Tulang Bawang Udik, Muara Sungkai, Tulang Bawang Tengah
6	SMAN 2 Tulang Bawang Udik	Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Abung Surakarta
7	SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah
8	SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Terusan Nunyai
9	SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, Menggala
10	SMAN 1 Pagar Dewa	Kec. Pagar Dewa, Banjar Agung, Lambu Kibang, Banjar Baru
11	SMAN 1 Gunung Agung	Kec. Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih
12	SMAN 1 Gunung Terang	Kec. Gunung Terang, Gunung Agung, Lambu Kibang
13	SMAN 1 Lambu Kibang	Kec. Lambu Kibang, Gunung Terang, Way Kenanga
14	SMAN 1 Way Kenanga	Kec. Way Kenanga, Gunung Agung, Gunung Terang
15	SMAN 1 Batu Putih	Kec. Batu Putih, Gunung Agung, Way Kenanga

Sumber: (Republika, 2019)

4.2.15 Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 35. Zona Kecamatan setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Sekolah	Zona Kecamatan
1	SMAN 1 Bangkumat Belimbing	Kec. Way Haru, Bangkumat Belimbing
2	SMAN 2 Bangkumat Belimbing	Kec. Bangkumat Belimbing, Bengkumat
3	SMAN 1 Bengkumat	Kec. Ngaras, Bengkumat
4	SMAN 1 Ngambur	Kec. Ngambur, Ngaras
5	SMAN 1 Pesisir Selatan	Kec. Pesisir Selatan, Krui Selatan
6	SMAN 1 Pesisir Tengah	Kec. Pesisir Tengah, Krui Selatan, Way Krui
7	SMAN 1 Karya Penggawa	Kec. Karya Penggawa, Way Krui, Pulau Pisang
8	SMAN 1 Pesisir Utara	Kec. Pesisir Utara, Pulau Pisang
9	SMAN 1 Lemong	Kec. Lemong

Sumber: (Republika, 2019)

4.3 Daya Tampung Sistem Zonasi Tingkat SMA di Provinsi Lampung

Sistem Zonasi Sekolah di Provinsi Lampung pada tahun 2019 diterapkan oleh seluruh SMA Negeri baik jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) maupun jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Setiap calon siswa berhak mendaftar di beberapa pilihan SMA Negeri terdekat dan setiap siswa yang mendaftar berpeluang masuk sebagai siswa dari salah satu sekolah yang mereka pilih. Akan tetapi, setiap SMA Negeri di Provinsi Lampung memiliki daya tampungnya tersendiri sehingga apabila sebuah SMA Negeri sudah mencapai batas maksimal dari jumlah siswa terdekat yang akan diterima maka untuk nama-nama siswa yang tidak masuk ke dalam daftar akan diteruskan ke SMA Negeri lain sesuai dengan pilihan siswa masing-masing.

4.3.1 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 36. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Natar	227	118	345
2	SMAN 2 Natar	143	180	323
3	SMAN 1 Jati Agung	-	-	-
4	SMAN 1 Tanjung Sari	-	-	-
5	SMAN 1 Tanjung Bintang	138	143	281
6	SMAN 1 Merbau Mataram	-	-	-
7	SMAN 1 Katibung	-	-	-
8	SMAN 1 Way Sulan	-	-	-
9	SMAN 1 Candipuro	-	-	-
10	SMAN 1 Sidomulyo	178	179	357
11	SMAN 1 Kalianda	189	196	385
12	SMAN 2 Kalianda	164	167	331
13	SMAN 1 Penengahan	108	108	216
14	SMAN 1 Palas	59	67	126
15	SMAN 1 Sragi	71	72	143
16	SMAN 1 Rajabasa	-	-	-
17	SMAN 1 Ketapang	-	-	-
18	SMAN 1 Bakauheni	-	-	-

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.2 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 37. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Bandar Surabaya	70	72	142
2	SMAN 1 Seputih Surabaya	132	135	267
3	SMAN 1 Rumbia	180	108	288
4	SMAN 1 Bumi Nabung	-	-	-
5	SMAN 1 Way Seputih	70	71	141
6	SMAN 1 Seputih Banyak	173	140	313
7	SMAN 1 Seputih Raman	148	160	308
8	SMAN 1 Kota Gajah	227	167	394
9	SMAN 1 Punggur	176	143	319
10	SMAN 1 Trimurjo	144	144	288
11	SMAN 1 Gunung Sugih	107	134	241
12	SMAN 1 Anak Tuha	-	-	-
13	SMAN 1 Padang Ratu	-	-	-
14	SMAN 1 Pubian	-	-	-
15	SMAN 1 Bandar Mataram	-	-	-
16	SMAN 1 Seputih Mataram	138	108	246
17	SMAN 1 Terbanggi Besar	193	161	354
18	SMAN 1 Terbanggi Agung	-	-	-
19	SMAN 1 Terusan Nunyai	216	216	342
20	SMAN 1 Anak Ratu Aji	-	-	-
21	SMAN 1 Way Pengubuan	-	-	-
22	SMAN 1 Kalirejo	134	144	278
23	SMAN 1 Bangun Rejo	133	139	272
24	SMAN 1 Sendang Agung	108	108	216

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.3 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara

Tabel 38. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Utara

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Kota Bumi	229	99	328
2	SMAN 2 Kota Bumi	173	125	298
3	SMAN 3 Kota Bumi	187	123	310
4	SMAN 4 Kota Bumi	181	127	308
5	SMAN 1 Bukit Kemuning	116	122	238
6	SMAN 1 Tanjung Raya	124	96	220
7	SMAN 2 Tanjung Raya	34	34	68
8	SMAN 1 Abung Tinggi	93	63	156
9	SMAN 1 Abung Barat	143	71	214
10	SMAN 1 Abung Tengah	68	36	104
11	SMAN 1 Abung Kunang	70	35	105
12	SMAN 1 Abung Pekurun	102	102	204
13	SMAN 1 Abung Semuli	64	96	232
14	SMAN 2 Abung Semuli	64	96	232
15	SMAN 1 Abung Selatan	102	102	204
16	SMAN 1 Abung Timur	64	64	128
17	SMAN 1 Sungkai Jaya	64	64	128
18	SMAN 1 Sungkai Utara	127	128	255
19	SMAN 1 Sungkai Selatan	62	96	158
20	SMAN 1 Sungkai Barat	36	36	72
21	SMAN Bakti Mulya	32	64	96
22	SMAN 1 Muara Sungkai	34	34	68
23	SMAN 1 Hulu Sungkai	64	64	128
24	SMAN 1 Bunga Mayang	-	-	-

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.4 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 39. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Liwa	165	108	273
2	SMAN 1 Sumber Jaya	85	126	211
3	SMAN 1 Way Tenong	121	123	244
4	SMAN 1 Belalau	91	61	152
5	SMAN 1 Sekincau	64	91	155
6	SMAN 1 Sukau	91	96	187
7	SMAN 2 Way Tenong	32	32	64
8	SMAN 1 Kebun Tebu	61	93	154
9	SMAN 1 Bandar Negeri Suoh	24	72	96
10	SMAN 1 Batu Brak	32	32	64
11	SMAN 2 Liwa	91	91	182
12	SMAN 1 Air Hitam	32	32	64
13	SMAN 1 Pagar Dewa	36	4	40
14	SMAN 1 Lumbok Seminung	32	32	64
15	SMAN 1 Batu Ketulis	32	32	64

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.5 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 40. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Banjar Agung	130	141	271
2	SMAN 1 Banjar Baru	72	72	144
3	SMAN 1 Banjar Margo	108	144	252
4	SMAN 1 Dente Teladas	35	70	105
5	SMAN 2 Dente Teladas	69	35	104
6	SMAN 1 Gedung Aji	-	-	-
7	SMAN 1 Gedung Aji Baru	-	-	-
8	SMAN 1 Gedung Meneng	36	72	108
9	SMAN 1 Menggala	144	108	252
10	SMAN 2 Menggala	107	72	179
11	SMAN 3 Menggala	95	92	187
12	SMAN 1 Merkasa Aji	70	36	106
13	SMAN 1 Penawar Aji	-	-	-
14	SMAN 1 Penawar Tama	108	72	180
15	SMAN 1 Rawa Pitu	-	-	-
16	SMAN 1 Rawajitu Selatan	-	-	-

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.6 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tanggamus

Tabel 41. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tanggamus

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Semaka	144	108	252
2	SMAN 1 Wonosobo	88	59	147
3	SMAN 1 Kota Agung	127	128	253
4	SMAN 2 Kota Agung	138	140	278
5	SMAN 1 Pematang Sawa	32	32	64
6	SMAN 1 Sumberejo	98	101	199
7	SMAN 1 Talang Padang	156	154	310
8	SMAN 1 Pulau Panggur	144	72	216
9	SMAN 1 Air Naningan	35	107	142
10	SMAN 1 Ulu Belu	72	72	144
11	SMAN 2 Ulu Belu	32	32	64
12	SMAN 1 Bulok	108	72	180
13	SMAN 1 Cukuh Balak	36	36	72
14	SMAN 1 Kelumbayan	36	36	72
15	SMAN 1 Kelumbayan Barat	46	104	150
16	SMAN 1 Limau	72	72	144
17	SMAN 1 Gunung Alip	71	69	140

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.7 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur

Tabel 42. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Lampung Timur

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Sukadana	134	108	242
2	SMAN Marga Tiga	72	72	144
3	SMAN Pekalongan	104	106	210
4	SMAN 1 Purbolinggo	159	123	282
5	SMAN 1 Raman Utara	108	108	216
6	SMAN 1 Way Bungur	72	72	144
7	SMAN 1 Batanghari	108	144	252
8	SMAN 1 Kibang	144	144	288
9	SMAN 1 Sekampung	179	142	321
10	SMAN 2 Sekampung	134	133	267
11	SMAN 1 Way Jepara	194	131	325
12	SMAN 1 Labuhan Ratu	136	133	269
13	SMAN 1 Sekampung Udik	136	105	241
14	SMAN 1 Jabung	72	72	144
15	SMAN 1 Way Karya	99	66	241
16	SMAN 1 Bandar Sribawono	167	137	304
17	SMAN 1 Gunung Pelindung	72	72	144
18	SMAN 1 Labuhan Maringgai	144	144	288
19	SMAN 1 Melinting	104	71	175
20	SMAN 1 Pasir Sakti	133	144	277

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.8 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Way Kanan

Tabel 43. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Way Kanan

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Kasui	179	108	287
2	SMAN 2 Kasui	35	70	105
3	SMAN 1 Baradatu	177	144	321
4	SMAN 1 Blambangan Umpu	102	171	273
5	SMAN 2 Blambangan Umpu	-	-	-
6	SMAN 1 Banjit	143	106	249
7	SMAN 2 Banjit			
8	SMAN 1 Buay Bahuga	54	56	110
9	SMAN 2 Buay Bahuga	144	108	252
10	SMAN 1 Bumi Agung	144	72	216
11	SMAN 2 Bumi Agung			
12	SMAN 1 Negara Batin	65	65	130
13	SMAN 2 Negara Batin			
14	SMAN 1 Negeri Agung	36	72	108
15	SMAN 2 Negeri Agung	96	64	160
16	SMAN 1 Negeri Besar	30	30	60
17	SMAN 2 Negeri Besar	-	-	-
18	SMAN 1 Gunung Labuhan	69	103	172
19	SMAN 2 Gunung Labuhan	36	72	108
20	SMAN 1 Pakuan Ratu	34	72	106
21	SMAN 1 Rebas Tangkas	36	60	96
22	SMAN 2 Rebas Tangkas	-	-	-
23	SMAN 1 Way Tuba	72	72	144
24	SMAN 1 Gedung Harapan	-	-	-

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.9 Daya Tampung setiap SMA di Kota Bandar Lampung

Tabel 44. Daya Tampung setiap SMA di Kota Bandar Lampung

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Bandar Lampung	155	92	247
2	SMAN 2 Bandar Lampung	241	88	329
3	SMAN 3 Bandar Lampung	198	169	367
4	SMAN 4 Bandar Lampung	171	136	307
5	SMAN 5 Bandar Lampung	170	119	289
6	SMAN 6 Bandar Lampung	179	142	321
7	SMAN 7 Bandar Lampung	187	160	347
8	SMAN 8 Bandar Lampung	214	214	428
9	SMAN 9 Bandar Lampung	183	115	298
10	SMAN 10 Bandar Lampung	213	93	306
11	SMAN 11 Bandar Lampung	105	108	213
12	SMAN 12 Bandar Lampung	175	178	353
13	SMAN 13 Bandar Lampung	245	179	424
14	SMAN 14 Bandar Lampung	241	179	420
15	SMAN 15 Bandar Lampung	166	139	305
16	SMAN 16 Bandar Lampung	176	107	283
17	SMAN 17 Bandar Lampung	72	72	144

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.10 Daya Tampung setiap SMA di Kota Metro

Tabel 45. Daya Tampung setiap SMA di Kota Metro

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Metro	226	61	287
2	SMAN 2 Metro	161	169	330
3	SMAN 3 Metro	162	136	296
4	SMAN 4 Metro	154	121	275
5	SMAN 5 Metro	128	135	263
6	SMAN 6 Metro	135	132	267

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.11 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesawaran

Tabel 46. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesawaran

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Gedong Tataan	248	142	390
2	SMAN 2 Gedong Tataan	72	69	141
3	SMAN 1 Kedondong	141	108	249
4	SMAN 1 Way Khilau	72	35	107
5	SMAN 1 Way Lima	108	108	216
6	SMAN 1 Negeri Katon	104	70	174
7	SMAN 2 Negeri Katon	72	36	108
8	SMAN 1 Tegineneng	108	72	180
9	SMAN 2 Tegineneng	108	107	215
10	SMAN 1 Padang Cermin	168	139	307
11	SMAN 2 Padang Cermin	106	106	212
12	SMAN 1 Punduh Pedada	144	144	288
13	SMAN 2 Punduh Pedada	72	72	144

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.12 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Mesuji

Tabel 47. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Mesuji

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Simpang Pematang	69	103	172
2	SMAN 1 Tanjung Raya	84	116	200
3	SMAN 1 Way Serdang	106	90	196
4	SMAN 1 Mesuji Timur	-	-	-
5	SMAN 1 Mesuji Lampung	-	-	-
6	SMAN 2 Way Serdang	-	-	-
7	SMAN 2 Simpang Pematang	-	-	-
8	SMAN 1 Panca Jaya	-	-	-
9	SMAN 1 Rawa Jitu Utara	-	-	-

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.13 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pringsewu

Tabel 48. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pringsewu

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Pringsewu	207	62	269
2	SMAN 2 Pringsewu	197	133	330
3	SMAN 1 Gadingrejo	235	91	326
4	SMAN 2 Gadingrejo	131	136	267
5	SMAN 1 Ambarawa	164	133	297
6	SMAN 1 Pagelaran	209	141	350
7	SMAN 1 Sukoharjo	174	180	354
8	SMAN 1 Adiluwih	106	106	212
9	SMAN 1 Banyumas	102	102	204
10	SMAN 1 Pardasuka	72	108	180

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.14 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 49. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Tumijajar	167	169	336
2	SMAN 2 Tumijajar	61	122	183
3	SMAN 3 Tumijajar	4	36	40
4	SMAN 4 Tumijajar	-	-	-
5	SMAN 1 Tulang Bawang Udik	32	64	96
6	SMAN 2 Tulang Bawang Udik	107	108	215
7	SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	110	139	249
8	SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	71	107	178
9	SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	36	66	102
10	SMAN 1 Pagar Dewa	108	108	216
11	SMAN 1 Gunung Agung	58	60	118
12	SMAN 1 Gunung Terang	36	72	108
13	SMAN 1 Lambu Kibang	-	-	-
14	SMAN 1 Way Kenanga	30	30	60
15	SMAN 1 Batu Putih	36	36	72

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

4.3.15 Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 50. Daya Tampung setiap SMA di Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Sekolah	Daya Tampung		
		IPA	IPS	Total
1	SMAN 1 Bangkumat Belimbing	36	72	108
2	SMAN 2 Bangkumat Belimbing			
3	SMAN 1 Bengkumat	35	70	105
4	SMAN 1 Ngambur	99	165	264
5	SMAN 1 Pesisir Selatan	105	139	244
6	SMAN 1 Pesisir Tengah	174	140	314
7	SMAN 1 Karya Penggawa			
8	SMAN 1 Pesisir Utara			
9	SMAN 1 Lemong	108	108	216

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tahapan Mengolah Data *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Munthafa dan Mubarak, 2017) :

5.1.1 Mendefinisikan Masalah dan Menentukan Solusi

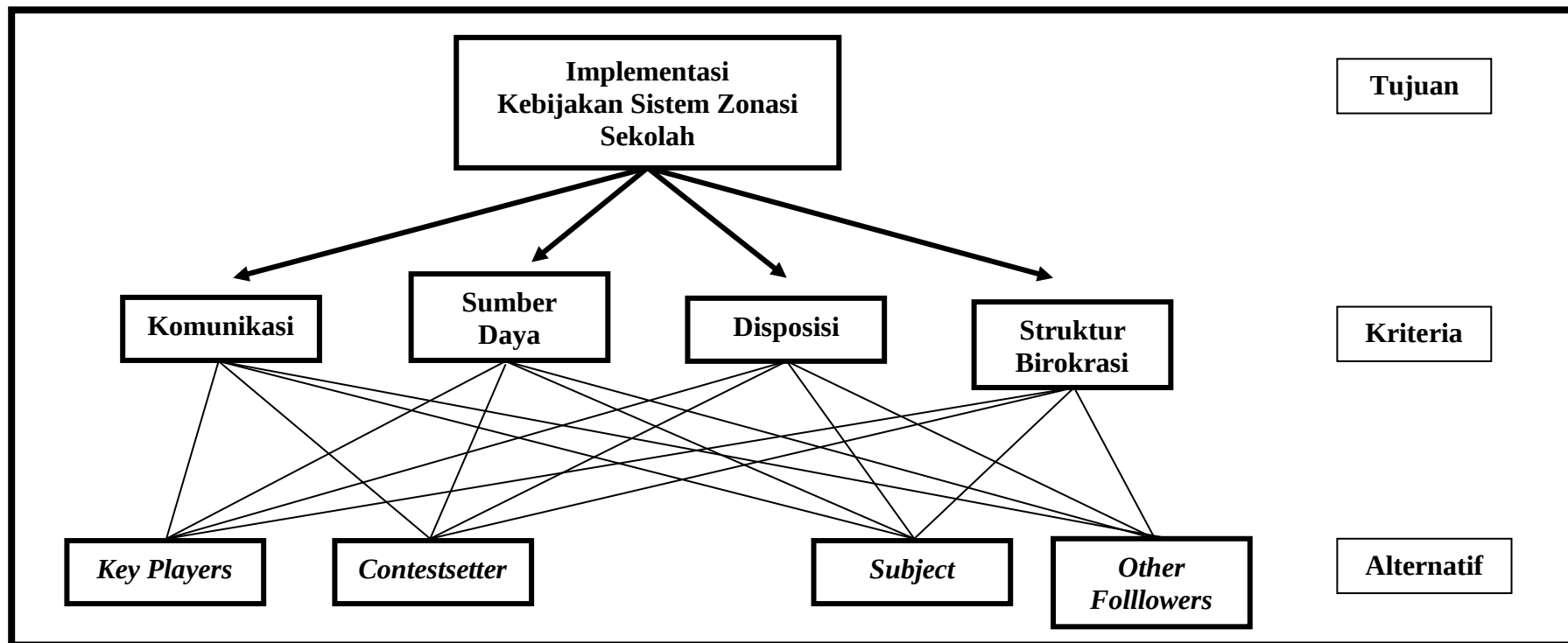
Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Penelitian ini berusaha mencari aktor kebijakan paling dominan dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. Berikut pemetaan masalah dan solusi dalam penelitian ini:

Tabel 51. Pemetaan Masalah dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Masalah	Solusi	
	Variabel Implementasi	Aktor Implementasi
Berkaitan dengan kondisi mutu pendidikan, terlihat masih belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia. Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).	Komunikasi	<i>Key Players</i> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung • Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi Lampung
	Sumber Daya	<i>Contestsetter</i> • Komisi V DPRD Provinsi Lampung • Dewan Pendidikan Lampung
	Disposisi	<i>Subject</i> • Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung • Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung
	Struktur Birokrasi	<i>Other Followers</i> • Dosen Manajemen Pendidikan Unila • Pengamat Kebijakan Pendidikan

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

5.1.2 Membuat Struktur Hierarki yang Diawali dengan Tujuan Utama



Gambar 4 Tujuan, Kriteria dan Alternatif Penelitian.

Sumber: diolah peneliti, 2021

5.1.3 Mendefinisikan Perbandingan Berpasangan

Sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak:

“ $n \times [(n-1)/2]$ ” buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Semakin tinggi nilai maka semakin besar penilaian terhadap elemen yang dituju. Berikut adalah skala perbandingan berpasangan dalam penelitian ini:

Tabel 52. Skala Perbandingan Kriteria: Variabel Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
Komunikasi																		Kemampuan
Komunikasi																		Kepribadian
Komunikasi																		Peraturan
Kemampuan																		Kepribadian
Kemampuan																		Peraturan
Kepribadian																		Peraturan

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 53. (lanjutan)

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Dosen
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Ikatan Guru Indonesia
Dewan Pendidikan Lampung																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Dosen
Dewan Pendidikan Lampung																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Dosen
Ikatan Guru Indonesia																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Dosen
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dosen Manajemen Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan

Sumber: Diolah peneliti, 2021

5.1.4 Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks ini menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi.

Perbandingan dilakukan berdasarkan *judgment* dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Poin ditulis di bagian baris tabel untuk nilai yang sifatnya bulat seperti 1, 2, 3 dst sementara untuk kolom pada baris yang bersangkutan ditulis 1/n atau kebalikan dari poin baris tabel seperti 1/1, 1/2, 1/3 dst. Jika ada lebih dari 1 informan maka poin dalam baris dan kolom yang sama dikalikan dari setiap informan yang terlibat. Dalam penelitian ini dihasilkan matriks perbandingan berpasangan sebagai berikut:

Tabel 54. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria

KRITERIA	Komunikasi	Sumber Daya	Disposisi	Struktur Birokrasi
Komunikasi	1,00	0,25	1,13	1,23
Sumber Daya	2,00	1,00	0,99	0,56
Disposisi	1,32	0,99	1,00	0,34
Struktur Birokrasi i	0,78	1,74	1,15	1,00
JUMLAH	5,10	3,98	4,26	3,13

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 55. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi

	Dinas	MKKS	DPRD	DPL	IGI	LPMP	Dosen	Pengamat
Dinas	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,60
MKKS	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,20
DPRD	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
DPL	0,50	0,50	1,00	1,00	1,50	3,00	0,75	1,20
IGI	1,00	0,50	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00
LPMP	0,50	0,50	0,50	0,33	1,00	1,00	1,00	4,00
Dosen	0,50	0,66	0,20	1,32	1,00	1,00	1,00	1,00
Pengamat	0,63	0,83	1,00	0,83	1,25	0,25	1,00	1,00
JUMLAH	5,63	5,99	7,70	9,08	9,75	12,25	9,25	12,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 56. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya

	Dinas	MKKS	DPRD	DPL	IGI	LPMP	Dosen	Pengamat
Dinas	1,00	2,00	1,58	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00
MKKS	0,50	1,00	3,00	1,00	0,80	2,00	1,00	2,00
DPRD	0,06	0,33	1,00	1,00	4,00	2,00	1,32	0,30
DPL	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,66	1,00	2,00
IGI	0,50	1,25	0,25	1,00	1,00	0,30	2,00	1,00
LPMP	0,13	0,50	0,50	0,75	3,30	1,00	2,00	1,00
Dosen	0,33	0,50	0,75	1,00	0,50	0,50	1,00	1,31
Pengamat	0,50	0,50	0,13	0,50	1,00	1,00	0,74	1,00
JUMLAH	3,52	7,08	8,22	8,25	13,60	8,46	12,06	10,61

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 57. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Disposisi

	Dinas	MKKS	DPRD	DPL	IGI	LPMP	Dosen	Pengamat
Dinas	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00
MKKS	1,00	1,00	0,99	0,40	1,00	2,00	1,00	2,25
DPRD	0,50	0,99	1,00	2,00	1,24	1,13	1,16	1,65
DPL	1,00	2,50	0,50	1,00	1,65	0,78	0,80	1,09
IGI	1,00	1,00	0,79	0,60	1,00	1,05	0,98	2,52
LPMP	0,33	0,50	0,90	1,28	0,92	1,00	2,04	1,32
Dosen	1,00	1,00	0,84	1,25	1,01	0,51	1,00	1,49
Pengamat	1,00	0,44	0,60	0,94	0,95	0,75	0,65	1,00
JUMLAH	6,83	8,43	7,62	8,47	8,77	10,22	8,63	12,31

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 58. Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi

	Dinas	MKKS	DPRD	DPL	IGI	LPMP	Dosen	Pengamat
Dinas	1,00	1,06	0,87	0,60	2,88	2,97	2,00	2,00
MKKS	0,94	1,00	2,00	0,67	1,13	1,65	2,00	2,00
DPRD	1,13	0,50	1,00	1,34	1,20	2,10	1,00	1,00
DPL	1,65	1,47	0,74	1,00	2,18	0,85	1,00	1,00
IGI	0,35	0,87	0,85	0,45	1,00	2,00	0,66	0,44
LPMP	0,33	0,60	0,46	1,20	0,50	1,00	1,00	1,65
Dosen	0,50	0,50	1,00	1,00	0,09	1,00	1,00	0,85
Pengamat	0,50	0,50	1,00	1,00	0,38	0,60	1,20	1,00
JUMLAH	6,39	6,50	7,93	7,26	9,36	12,17	9,86	9,94

Sumber: Diolah peneliti, 2021

5.1.5 Melakukan Normalisasi dan Menentukan *Eigen Vector* setiap Elemen

Hal ini merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata atau *eigen vector*.

Tabel 59. Normalisasi dan *Eigen Vector* Kriteria

KRITERIA	C1	C2	C3	C4	JUMLAH	<i>EIGEN VECTOR</i>
C1	0,20	0,06	0,26	0,39	0,91	0,23
C2	0,39	0,25	0,23	0,18	1,06	0,26
C3	0,26	0,25	0,23	0,11	0,85	0,21
C4	0,15	0,44	0,27	0,32	1,18	0,30
JML	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

- C1 : Komunikasi
- C2 : Sumber Daya
- C3 : Disposisi
- C4 : Struktur Birokrasi

Tabel 60. Normalisasi dan *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	<i>EIGEN VECTOR</i>
C1	0,18	0,17	0,26	0,22	0,10	0,16	0,22	0,13	1,44	0,18
C2	0,18	0,17	0,13	0,22	0,21	0,16	0,16	0,10	1,33	0,17
C3	0,09	0,17	0,13	0,11	0,10	0,16	0,11	0,08	0,95	0,12
C4	0,09	0,08	0,13	0,11	0,15	0,24	0,08	0,10	0,99	0,12
C5	0,18	0,08	0,13	0,07	0,10	0,08	0,11	0,08	0,83	0,10
C6	0,09	0,08	0,06	0,04	0,10	0,08	0,11	0,33	0,90	0,11
C7	0,09	0,11	0,03	0,15	0,10	0,08	0,11	0,08	0,75	0,09
C8	0,11	0,14	0,13	0,09	0,13	0,02	0,11	0,08	0,81	0,10
JML	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

- C1: Dinas Pendidikan
- C2: MKKS
- C3: DPRD
- C4: DPL
- C5: IGI
- C6: LPMP
- C7: Dosen
- C8: Pengamat

Tabel 61. Normalisasi dan *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	<i>EIGEN VECTOR</i>
C1	0,28	0,28	0,19	0,24	0,15	0,12	0,25	0,19	1,70	0,21
C2	0,14	0,14	0,37	0,12	0,06	0,24	0,08	0,19	1,34	0,17
C3	0,02	0,05	0,12	0,12	0,29	0,24	0,11	0,03	0,98	0,12
C4	0,14	0,14	0,12	0,12	0,07	0,08	0,08	0,19	0,95	0,12
C5	0,14	0,18	0,03	0,12	0,07	0,04	0,17	0,09	0,84	0,10
C6	0,04	0,07	0,06	0,09	0,24	0,12	0,17	0,09	0,88	0,11
C7	0,09	0,07	0,09	0,12	0,04	0,06	0,08	0,12	0,68	0,08
C8	0,14	0,07	0,02	0,06	0,07	0,12	0,06	0,09	0,64	0,08
JML	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

C1: Dinas Pendidikan

C5: IGI

C2: MKKS

C6: LPMP

C3: DPRD

C7: Dosen

C4: DPL

C8: Pengamat

Tabel 62. Normalisasi dan *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Disposisi

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	<i>EIGEN VECTOR</i>
C1	0,15	0,12	0,26	0,12	0,11	0,29	0,12	0,08	1,25	0,16
C2	0,15	0,12	0,13	0,05	0,11	0,20	0,12	0,18	1,05	0,13
C3	0,07	0,12	0,13	0,24	0,14	0,11	0,13	0,13	1,08	0,13
C4	0,15	0,30	0,07	0,12	0,19	0,08	0,09	0,09	1,07	0,13
C5	0,15	0,12	0,10	0,07	0,11	0,10	0,11	0,20	0,97	0,12
C6	0,05	0,06	0,12	0,15	0,11	0,10	0,24	0,11	0,92	0,12
C7	0,15	0,12	0,11	0,15	0,12	0,05	0,12	0,12	0,92	0,12
C8	0,15	0,05	0,08	0,11	0,11	0,07	0,08	0,08	0,73	0,09
JML	0,15	0,12	0,26	0,12	0,11	0,29	0,12	0,08	1,25	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

C1: Dinas Pendidikan

C5: IGI

C2: MKKS

C6: LPMP

C3: DPRD

C7: Dosen

C4: DPL

C8: Pengamat

Tabel 63. Normalisasi dan *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	<i>EIGEN VECTOR</i>
C1	0,16	0,16	0,11	0,08	0,31	0,24	0,20	0,20	1,47	0,18
C2	0,15	0,15	0,25	0,09	0,12	0,14	0,20	0,20	1,30	0,16
C3	0,18	0,08	0,13	0,19	0,13	0,17	0,10	0,10	1,07	0,13
C4	0,26	0,23	0,09	0,14	0,23	0,07	0,10	0,10	1,22	0,15
C5	0,05	0,13	0,11	0,06	0,11	0,16	0,07	0,04	0,74	0,09
C6	0,05	0,09	0,06	0,17	0,05	0,08	0,10	0,17	0,77	0,10
C7	0,08	0,08	0,13	0,14	0,01	0,08	0,10	0,09	0,70	0,09
C8	0,08	0,08	0,13	0,14	0,04	0,05	0,12	0,10	0,73	0,09
JML	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

C1: Dinas Pendidikan

C5: IGI

C2: MKKS

C6: LPMP

C3: DPRD

C7: Dosen

C4: DPL

C8: Pengamat

5.1.6 Mengalikan Matriks Awal dengan *Eigen Vector* tiap Elemen

Langkah ini dilakukan dengan mengalikan hasil penggabungan matriks awal dengan *eigen vector* yang telah didapatkan untuk masing-masing kriteria. Hasil yang didapatkan kemudian dijumlahkan dan dicari rata-rata nya untuk mendapatkan vektor bobot atau λ maksimal.

Tabel 64. Hasil Kali Matriks Awal dengan *EigenVector* Kriteria

KRITERIA	C1	C2	C3	C4	JUMLAH	JUMLAH/ <i>EIGEN VECTOR</i>
C1	0,23	0,06	0,26	0,28	0,82	3,60
C2	0,53	0,26	0,26	0,15	1,20	4,55
C3	0,28	0,21	0,21	0,07	0,77	3,65
C4	0,23	0,51	0,34	0,30	1,38	4,68
Λ maksimal						4,12

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

- C1 : Komunikasi
 C2 : Sumber Daya
 C3 : Disposisi
 C4 : Struktur Birokrasi

Tabel 65. Hasil Kali Matriks Awal dengan *EigenVector* Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	JUMLAH/ <i>EIGEN</i> <i>VECTOR</i>
C1	0,18	0,18	0,36	0,36	0,18	0,36	0,36	0,29	2,27	12,60
C2	0,17	0,17	0,17	0,33	0,33	0,33	0,25	0,20	1,94	11,70
C3	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	0,24	0,12	0,12	1,01	8,50
C4	0,06	0,06	0,12	0,12	0,19	0,37	0,09	0,15	1,17	9,45
C5	0,10	0,05	0,10	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,74	7,10
C6	0,06	0,06	0,06	0,04	0,11	0,11	0,11	0,45	0,99	8,83
C7	0,05	0,06	0,02	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,62	6,68
C8	0,06	0,08	0,10	0,08	0,13	0,03	0,10	0,10	0,69	6,78
Δ maksimal										8,95

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

- C1: Dinas Pendidikan
 C2: MKKS
 C3: DPRD
 C4: DPL
 C5: IGI
 C6: LPMP
 C7: Dosen
 C8: Pengamat

Tabel 66. Hasil Kali Matriks Awal dengan *EigenVector* Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	JUMLAH/ <i>EIGEN</i> <i>VECTOR</i>
C1	0,21	0,43	0,34	0,43	0,43	0,21	0,64	0,43	3,11	14,58
C2	0,08	0,17	0,50	0,17	0,13	0,33	0,17	0,33	1,89	11,30
C3	0,01	0,04	0,12	0,12	0,49	0,24	0,16	0,04	1,22	10,01
C4	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,24	0,97	8,16
C5	0,05	0,13	0,03	0,10	0,10	0,03	0,21	0,10	0,77	7,30
C6	0,01	0,05	0,05	0,08	0,36	0,11	0,22	0,11	1,01	9,18
C7	0,03	0,04	0,06	0,08	0,04	0,04	0,08	0,11	0,50	5,89
C8	0,04	0,04	0,01	0,04	0,08	0,08	0,06	0,08	0,43	5,37
Δ maksimal									8,97	

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

C1: Dinas Pendidikan

C5: IGI

C2: MKKS

C6: LPMP

C3: DPRD

C7: Dosen

C4: DPL

C8: Pengamat

Tabel 67. Hasil Kali Matriks Awal dengan *EigenVector* Alternatif terhadap Kriteria Disposisi

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	JUMLAH/ <i>EIGEN</i> <i>VECTOR</i>
C1	0,16	0,16	0,31	0,16	0,16	0,47	0,16	0,16	1,72	11,00
C2	0,13	0,13	0,13	0,05	0,13	0,26	0,13	0,30	1,27	9,64
C3	0,07	0,13	0,13	0,27	0,17	0,15	0,16	0,22	1,30	9,66
C4	0,13	0,34	0,07	0,13	0,22	0,10	0,11	0,15	1,25	9,32
C5	0,12	0,12	0,10	0,07	0,12	0,13	0,12	0,31	1,09	8,94
C6	0,04	0,06	0,10	0,15	0,11	0,12	0,24	0,15	0,96	8,29
C7	0,12	0,12	0,10	0,14	0,12	0,06	0,12	0,17	0,94	8,09
C8	0,09	0,04	0,05	0,09	0,09	0,07	0,06	0,09	0,57	6,33
Δ maksimal									8,91	

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

C1: Dinas Pendidikan

C5: IGI

C2: MKKS

C6: LPMP

C3: DPRD

C7: Dosen

C4: DPL

C8: Pengamat

Tabel 68. Hasil Kali Matriks Awal dengan *EigenVector* Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	JUMLAH	JUMLAH/ <i>EIGEN</i> <i>VECTOR</i>
C1	0,18	0,19	0,16	0,11	0,53	0,54	0,37	0,37	2,45	13,38
C2	0,15	0,16	0,33	0,11	0,18	0,27	0,33	0,33	1,86	11,38
C3	0,15	0,07	0,13	0,18	0,16	0,28	0,13	0,13	1,24	9,27
C4	0,25	0,22	0,11	0,15	0,33	0,13	0,15	0,15	1,51	9,89
C5	0,03	0,08	0,08	0,04	0,09	0,19	0,06	0,04	0,61	6,62
C6	0,03	0,06	0,04	0,12	0,05	0,10	0,10	0,16	0,65	6,74
C7	0,04	0,04	0,09	0,09	0,01	0,09	0,09	0,07	0,52	5,94
C8	0,05	0,05	0,09	0,09	0,03	0,05	0,11	0,09	0,57	6,18
Δ maksimal									8,67	

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

C1: Dinas Pendidikan

C5: IGI

C2: MKKS

C6: LPMP

C3: DPRD

C7: Dosen

C4: DPL

C8: Pengamat

5.1.7 Menghitung Konsistensi Hierarki

Langkah ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum melanjutkan ke penghitungan hasil akhir dalam *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil dari λ maksimal masing-masing kriteria dan alternatif-kriteria akan diolah kembali hingga menunjukkan data tersebut konsisten. Diawali dengan menghitung indeks konsistensi dan diakhiri dengan mendapatkan hasil rasio konsistensi yang harus $\leq 0,10$ untuk membuktikan bahwa data yang diolah cukup konsisten.

5.1.7.1 Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi Kriteria

a. Indeks Konsistensi (CI)

$$\begin{aligned}
 CI &= \frac{(\lambda_{\text{maksimal}} - n)}{(n - 1)} \\
 &= \frac{(4,12 - 4)}{(4 - 1)} \\
 &= 0,04
 \end{aligned}$$

b. *Random Index* (RI)**Tabel 69.** *Random Index* dalam *Analytical Hierarchy Process*

Ukuran Matriks	<i>Random Index</i> (RI)
1	0
2	0
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49

Sumber: (T. L. Saaty, 2004)

c. Rasio Konsistensi (CR)

$$\begin{aligned}
 CR &= \frac{CI}{RI} \\
 &= \frac{0,04}{0,90} \\
 &= 0,04 \quad (\text{Ket: } CR \leq 10 \text{ maka KONSISTEN})
 \end{aligned}$$

5.1.7.2 Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi

b. Indeks Konsistensi (CI)

$$\begin{aligned}
 CI &= \frac{(\lambda \text{ maksimal} - n)}{(n-1)} \\
 &= \frac{(8,95 - 8)}{(8 - 1)} \\
 &= 0,14
 \end{aligned}$$

c. *Random Index* (RI)

Tabel 70. *Random Index* dalam *Analytical Hierarchy Process*

Ukuran Matriks	<i>Random Index</i> (RI)
1	0
2	0
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49

Sumber: (T. L. Saaty, 2004)

d. Rasio Konsistensi (CR)

$$\begin{aligned}
 CR &= \frac{CI}{RI} \\
 &= \frac{0,14}{1,41} \\
 &= 0,10 \quad (\text{Ket: } CR \leq 10 \text{ maka KONSISTEN})
 \end{aligned}$$

5.1.7.3 Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi Kriteria Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya

a. Indeks Konsistensi (CI)

$$\begin{aligned}
 CI &= \frac{(\lambda \text{ maksimal} - n)}{(n-1)} \\
 &= \frac{(8,97 - 8)}{(8 - 1)} \\
 &= 0,14
 \end{aligned}$$

b. *Random Index* (RI)

Tabel 71. *Random Index* dalam *Analytical Hierarchy Process*

Ukuran Matriks	<i>Random Index</i> (RI)
1	0
2	0
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49

Sumber: (T. L. Saaty, 2004)

c. Rasio Konsistensi (CR)

$$\begin{aligned}
 CR &= \frac{CI}{RI} \\
 &= \frac{0,14}{1,41} \\
 &= 0,10 \quad (\text{Ket: } CR \leq 10 \text{ maka KONSISTEN})
 \end{aligned}$$

5.1.7.4 Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi Alternatif terhadap Kriteria Disposisi

a. Indeks Konsistensi (CI)

$$\begin{aligned}
 CI &= \frac{(\lambda \text{ maksimal} - n)}{(n-1)} \\
 &= \frac{(8,91 - 8)}{(8 - 1)} \\
 &= 0,13
 \end{aligned}$$

b. *Random Index* (RI)

Tabel 72. *Random Index* dalam *Analytical Hierarchy Process*

Ukuran Matriks	<i>Random Index</i> (RI)
1	0
2	0
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49

Sumber: (T. L. Saaty, 2004)

c. Rasio Konsistensi (CR)

$$\begin{aligned}
 CR &= \frac{CI}{RI} \\
 &= \frac{0,13}{1,41} \\
 &= 0,09 \quad (\text{Ket: } CR \leq 10 \text{ maka KONSISTEN})
 \end{aligned}$$

5.1.7.5 Indeks Konsistensi dan Rasio Konsistensi Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi

a. Indeks Konsistensi (CI)

$$\begin{aligned}
 CI &= \frac{(\lambda_{\text{maksimal}} - n)}{(n - 1)} \\
 &= \frac{(8,65 - 8)}{(8 - 1)} \\
 &= 0,10
 \end{aligned}$$

b. *Random Index* (RI)

Tabel 73. *Random Index* dalam *Analytical Hierarchy Process*

Ukuran Matriks	<i>Random Index</i> (RI)
1	0
2	0
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32
8	1,41
9	1,45
10	1,49

Sumber: (T. L. Saaty, 2004)

c. Rasio Konsistensi (CR)

$$\begin{aligned}
 CR &= \frac{CI}{RI} \\
 &= \frac{0,10}{1,41} \\
 &= 0,07 \quad (\text{Ket: } CR \leq 10 \text{ maka KONSISTEN})
 \end{aligned}$$

5.1.8 Mengalikan *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria dengan *Eigen Vector* Kriteria

Tabel 74. Hasil Kali *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria dengan *Eigen Vector* Kriteria

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
C1	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
C2	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
C3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
C4	0,05	0,05	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
JML	0,18	0,16	0,13	0,13	0,10	0,11	0,09	0,09

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Keterangan:

C1: Komunikasi

C2: Sumber Daya

C3: Disposisi

C4: Peraturan

A1: Dinas Pendidikan

A2: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

A3: DPRD

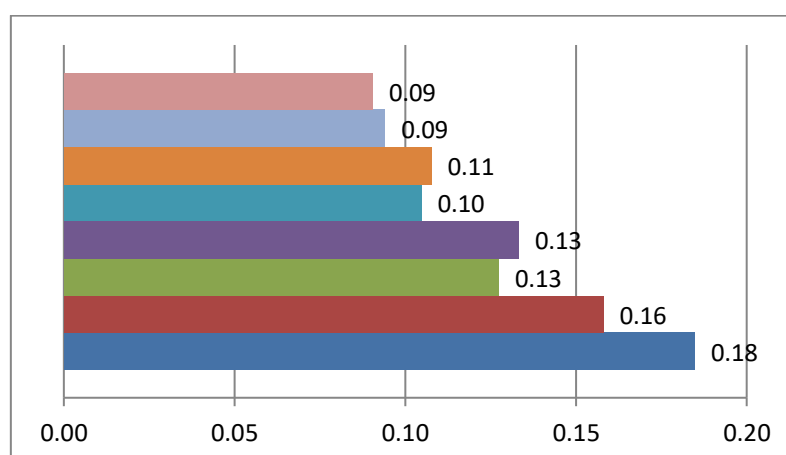
A4: Dewan Pendidikan Lampung

A5: Ikatan Guru Indonesia

A6: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

A7: Dosen Manajemen Pendidikan

A8: Pengamat Kebijakan Pendidikan



Gambar 5 Diagram Batang Hasil Akhir.

Sumber: Diolah peneliti, 2021

5.2 Pembahasan Hasil Akhir *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Bagian ini akan membahas analisis lanjutan dari sudut pandang peneliti yang dikaitkan dengan teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini. Hasil dari perhitungan AHP selanjutnya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dan dikaitkan dengan teorinya masing-masing. Berdasarkan data yang telah dihitung, urutan prioritas baik dalam variabel implemementasi ataupun aktor implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah telah didapatkan dengan melihat hasil akhir berupa *Eigen Vector*.

5.2.1 Kriteria: Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Tabel 75. *Eigen Vector* Kriteria

KRITERIA	<i>EIGEN VECTOR</i>
Komunikasi	0,23
Sumber Daya	0,26
Disposisi	0,21
Struktur Birokrasi	0,30
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Hasil dari *eigen vector* kriteria menunjukkan bahwa hierarki kepentingan variabel implementasi dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dimulai dari peraturan, kemampuan, komunikasi dan kepribadian. Angka *eigen vector* pada masing-masing elemen tidak berbeda jauh satu sama lain, hal ini membuktikan bahwa hierarki kepentingan keempat elemen tersebut sangat dekat dan hampir sama pentingnya dalam proses implememtasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, dengan kata lain tidak ada dominasi oleh salah satu elemen dalam hal kepentingan guna implementasi kebijakan dan keempatnya berkaitan serta saling melengkapi sesuai dengan teori George C. Edward, 1990 .

5.2.1.1 Kriteria: Struktur Birokrasi sebagai Variabel Implementasi Pertama

Dalam konteks ini Edwards membidik persoalan struktur dalam hal mendasar yaitu struktur birokrasi harus memiliki standar operasional prosedur yang merupakan pedoman langkah-langkah yang harus disepakati bersama berupa keseragaman pola dalam menjalankan proses implementasi kebijakan. Edwards menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Fragmentasi ini akan membawa konsekuensi besar dalam keberhasilan proses implementasi. Dalam konteks ini, Edwards mempertegas, bahwa pembagian pusat koordinasi harus dibagi dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan porsinya.

Sebagai informasi tambahan, di luar kuesioner yang tersedia peneliti juga melakukan obrolan ringan kepada setiap informan mengenai implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Peraturan atau yang lebih dikenal sebagai Struktur Birokrasi menjadi variabel implementasi paling penting sebab segala hal yang berkaitan dengan jalannya sebuah peraturan harus membutuhkan koordinasi dan tanggung jawab tiap aktor sehingga proses yang disebut fragmentasi ini akan mengarahkan tentang bagaimana seharusnya seorang aktor menggunakan kemampuannya, berkomunikasi dan tetap memperhatikan kepribadiannya.

Bentuk implementasi dari peraturan atau sumber daya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, kemudian peraturan ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan pada tahun 2019 diperbaharui kembali menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019, ketiga peraturan ini sama-sama membahas tentang Penerimaan

Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Peraturan ini yang menjadi kiblat dan rujukan para aktor tentang bagaimana kebijakan Sistem Zonasi Sekolah berjalan.

5.2.1.2 Kriteria: Sumber Daya sebagai Variabel Implementasi Kedua

Efektifitas kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan secara efektif dan baik ketika tidak di dukung oleh potensi-potensi sumber daya yang tidak tersedia. Diyakini bahwa sumberdaya-sumberdaya yang potensial akan berdampak langsung pada proses implementasi kebijakan. Termasuk dalam sumberdaya antara lain staf yang relatif jumlahnya yang disertai dengan kemampuan dan keahlian yang memadai untuk keperluan implementasi kebijakan. Sisi lain, informasi yang memadai, kewenangan yang dimiliki implementor, adanya fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana.

Kemampuan atau sumber daya menjadi hal penting kedua dalam variabel implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Kecakapan dan keahlian tiap aktor dalam melaksanakan implementasi kebijakan menjadi penentu berhasil tidaknya kebijakan tersebut. Tidak hanya pribadi, sebuah dinas, badan dan lembaga juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional didalamnya. Kemampuan dalam hal kebijakan akan membantu lahirnya ide-ide dan jalan keluar yang sangat bermanfaat serta strategi yang baik untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang berhasil sesuai dengan sasaran.

Bentuk dari variabel implementasi kemampuan/ sumber daya adalah para aktor yang memiliki latar belakang sesuai dengan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Di Dinas Pendidikan misalnya,

staff bidang SMA diisi oleh orang-orang kompeten yang mampu mengemban tupoksi apapun sesuai bidangnya terutama berkaitan dengan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, karena mereka memiliki latar belakang baik pendidikan ataupun keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka. Hal ini juga berlaku pada aktor-aktor yang bekerja dalam lingkup MKKS hingga pengamat kebijakan bidang pendidikan.

5.2.1.3 Kriteria: Komunikasi sebagai Variabel Implementasi Ketiga

Menurut George Edwards III, komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi tentang kebijakan antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini menyangkut transfer pengetahuan yang meliputi hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan dan lainnya. Edward berpendapat bahwa faktor *clarity* (kejelasan) menjadi penting dalam proses implementasi kebijakan. Tidak adanya pemaknaan yang ambigu. *Consistency* (konsisten) menjadi ukuran lain bagi Edwards dalam proses komunikasi implementasi kebijakan.

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentunya tidak hanya membutuhkan peran seorang aktor melainkan akan ada banyak peran aktor di dalamnya. Dalam proses ini akan terlihat bagaimana sebuah kebijakan berjalan dan apa dampaknya serta apakah nantinya kebijakan ini berhasil mencapai tujuan atau tidak. Kejelasan dan kebenaran mengenai apa yang disampaikan dan apa yang tersampaikan oleh tiap-tiap aktor kepada aktor lainnya mengenai hal terkait implementasi kebijakan akan menjadi melalui poin-poin yang mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi.

Komunikasi sendiri ditunjukkan dengan bentuk rapat dan diskusi seperti Rapat Dinas, Rapat Badan/ Lembaga, Sidang Paripurna DPRD, *Forum Group Discussion* (FGD), Musyawarah terbuka

kepada masyarakat, sosialisasi dan juga kunjungan kerja. Bahan-bahan yang dibahas dalam setiap pertemuan akan menjadi referensi tambahan sebagai pedoman menjalankan sebuah kebijakan yang terstruktur dan terencana. Dalam hal ini, akan ada banyak masukan dan saran serta tips sebagai bentuk representasi dari hadirnya para aktor yang memiliki andil dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

5.2.1.4 Kriteria: Kepribadian/ Disposisi sebagai Variabel Implementasi Keempat

Edwards menterjemahkan disposisi sebagai pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi pelaksana kebijakan publik. Harus terjadinya korelasi positif atas sikap, pandangan, kesungguhan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Hal terpenting dari disposisi yaitu staff birokrasi yang menekankan pada penempatan staf yang benar-benar kapabel dan selaras demi menjamin terlaksananya kebijakan. Kedua, yaitu pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan sebagai sarana pengendalian bagi pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam menjalankan suatu misi atau dalam hal ini adalah implementasi kebijakan maka orang-orang yang terlibat di dalamnya harus memiliki pandangan selaras dan kepribadian yang menyesuaikan. Kepribadian atau yang lebih dikenal dengan disposisi menekankan pada bagaimana seorang individu berbuat dan bertindak serta apa umpan balik yang individu tersebut dapatkan sesuai dengan *output* yang telah ia keluarkan berupa sikap dalam menjalankan suatu hal baik sendiri ataupun secara bersama-sama.

Implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah menekankan kepribadian atau disposisi dalam bentuk setiap aktor yang terlibat di dalamnya memiliki pandangan mendasar yang sama yaitu berpedoman pada ideologi Pancasila dan memegang teguh UUD 1945 sebagai landasan konsitusional. Hal ini harus dimiliki oleh setiap aktor implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah mulai dari Dinas Pendidikan hingga pengamat kebijakan pendidikan secara sama dan merata tanpa terkecuali. Sebagai tambahan, pola bersikap dan bertindak masing-masing aktor juga dibatasi oleh Kode Etik dari tiap lembaga atau organisasi dimana aktor tersebut bernaung yang biasanya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berbeda tiap organisasi atau lembaga.

5.2.2 Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Implementasi Kebijakan

Bagian ini akan membahas bagaimana hasil hierarki kepentingan masing-masing imlementasi kebijakan terhadap variabel implementasi kebijakan. Hierarki kepentingan masing-masing aktor diuji di tiap variabel implementasi kebijakan seperti komunikasi, emampuan atau sumber daya, kepribadian atau disposisi dan peraturan atau struktur birokrasi. Hasil olah data menunjukkan adanya hierarki kepentingan yang tidak statis di tiap variabel implementasi yang dijadikan sebagai kriteria bahan uji. Angka hierarki kepentingan masing-masing aktor yang tidak berbeda begitu jauh juga membuktikan bahwa semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah hampir sama pentingnya dan saling mempengaruhi sehingga tidak ada aktor dominan ataupun non dominan.

5.2.2.1 Hasil Uji Aktor Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Implementasi Kebijakan: Komunikasi

Tabel 76. *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Komunikasi

ALTERNATIF	<i>EIGEN VECTOR</i>
Dinas Pendidikan	0,18
MKKS	0,17
DPRD	0,12
DPL	0,12
IGI	0,10
LPMP	0,11
Dosen Pendidikan	0,09
Pengamat Kebijakan	0,10

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, dalam hal komunikasi Dinas Pendidikan sebagai aktor yang perannya paling penting dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dibandingkan dengan aktor-aktor lain. Selanjutnya MKKS, DPRD, DPL, LPMP, IGI, pengamat kebijakan dan dosen manajemen pendidikan berada di bawahnya dengan selisih poin yang tidak begitu banyak. Dalam hal komunikasi, Dinas Pendidikan harus menaungi lembaga setingkat ataupun organisasi yang berada di bawah naungannya dan juga pribadi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dengan maksimal.

Dinas Pendidikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang juga merupakan aktor pertama yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan mengenai Sistem Zonasi Sekolah. Berdasarkan ruang lingkup kerja yaitu bidang pendidikan maka Dinas Pendidikan harus membangun relasi yang erat terhadap aktor-aktor yang juga memiliki andil dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Pertemuan baik formal

maupun non formal memberikan ruang bagi aktor lainnya untuk berkontribusi dalam hal pencapaian tujuan kebijakan.

MKKS yang dikenal sebagai wadah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dalam lingkup SMA menduduki peringkat di bawah Dinas Pendidikan dengan selisih poin 0,1. Hal ini membuktikan bahwa MKKS juga wajib memimpin implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah terutama dalam hal komunikasi yang lebih ditekankan ke arah koordinasi. Dinas Pendidikan selanjutnya akan memberikan amanah kepada MKKS mengenai kebijakan ini dan selanjutnya diharapkan para kepala sekolah dapat menyampaikan segala hal mengenai kebijakan ini kepada sekolah masing-masing sehingga setiap sekolah mengerti apa yang mereka harus lakukan.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan Dewan Pendidikan Lampung memiliki poin yang sama yaitu berada di peringkat 3 dengan poin 0,12. Dengan *label* “dewan” maka kedua aktor ini memiliki peran yang hampir sama yaitu menangani bidang pendidikan. Komunikasi baik apa yang disampaikan maupun apa yang tersampaikan oleh aktor ini diharapkan mampu mengarahkan aktor-aktor lain untuk mewujudkan tujuan adanya kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Aktor ini memiliki kecakapan khusus di bidang pendidikan dan memiliki wewenang yang cukup tinggi untuk ikut serta dalam mensukseskan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) selanjutnya berada di peringkat 4 dalam hal menggunakan variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. LMPM harus mampu mengukur, mempertahankan dan meningkatkan kualitas guru dan pengajar, dalam hal

kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Komunikasi yang dibangun baik kepada aktor dengan hierarki di atasnya ataupun di bawahnya sama-sama harus mengedepankan bagaimana kualitas sekolah akan membaik setelah adanya kebijakan ini sehingga dapat dikatakan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah telah berhasil.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan pengamat kebijakan bidang pendidikan berada 1 tingkat di bawah LPMP dengan poin 0,10. Komunikasi yang terjalin antara IGI dan aktor lain harus mengedepankan prinsip bagaimana para guru tetap memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada siswa dan mempertahankan semangat siswa dalam belajar. Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah diharapkan tidak mengganggu kualitas guru dalam mengajar sebab para siswa yang menjalankan kebijakan ini bervariasi dan beragam, kesamaan mereka hanya karena berkediaman dekat dengan sekolah. Sementara pengamat kebijakan disini harus tetap terus membangun komunikasi dengan aktor terkait dalam hal meninjau sejauh apa tingkat keberhasilan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

Dosen Manajemen Pendidikan berada di tingkat paling akhir dengan poin 0,09 yang artinya juga hanya selisih 0,1 terhadap aktor yang berada setingkat di atasnya. Dosen Manajemen Pendidikan berkomunikasi dengan menyampaikan ide dan pendapat berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjang efektivitas kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Dosen juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui forum-forum umum yang melibatkan orang-orang yang juga cakap di bidang pendidikan untuk saling bertukar pikiran. Dalam hal komunikasi, dosen biasanya lebih intens berkomunikasi dengan Dewan Pendidikan sebab mereka berada di dalam satu naungan yang disebut universitas.

5.2.2.2 Hasil Uji Aktor Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Implementasi Kebijakan: Kemampuan/ Sumber Daya

Tabel 77. *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Sumber Daya

ALTERNATIF	<i>EIGEN VECTOR</i>
Dinas Pendidikan	0,21
MKKS	0,17
DPRD	0,12
DPL	0,12
IGI	0,10
LPMP	0,11
Dosen Pendidikan	0,08
Pengamat Kebijakan	0,08

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, dalam hal kemampuan Dinas Pendidikan sebagai aktor yang perannya paling penting dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dibandingkan dengan aktor-aktor lain. Selanjutnya MKKS, DPRD, DPL, LPMP, IGI, dosen manajemen pendidikan dan pengamat kebijakan berada di bawahnya dengan selisih poin yang tidak begitu banyak. Dalam hal kemampuan, Dinas Pendidikan harus menaungi lembaga setingkat ataupun organisasi yang berada di bawah naungannya dan juga pribadi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dengan maksimal.

Dinas Pendidikan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah harus memiliki kecakapan dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan daerah ataupun skala nasional. Dalam hal kemampuan, Dinas Pendidikan dan segala aktor yang terlibat di dalamnya harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup sehingga manajemen implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dapat dilakukan dengan maksimal dan matang di tahap awal

sebelum kemudian menjadi bahan kerja bersama dengan lembaga, badan, organisasi, pribadi yang berada setingkat atau di bawahnya.

Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA berada di peringkat 2 dalam hal kemampuan menjalankan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Dengan jabatan yang tinggi sebagai kepala yang berada di struktur tertinggi dalam sekolah yang ia pimpin, kepala sekolah memegang kendali yang besar dan berpengaruh bagi orang-orang yang ia pimpin. Kemampuan dalam memahami dan ikut serta menyusun strategi dalam hal pencapaian tujuan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sehingga melalui kebijakan ini kepala sekolah tetap dapat melakukan promosi guna mempertahankan eksistensi dan juga tetap mempertahankan bahkan meningkatkan nama baik sekolah melalui jalur prestasi ataupun non prestasi yang didapat oleh para siswa hasil seleksi kebijakan zonasi.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan Dewan Pendidikan Lampung (DPL) masih menduduki peringkat yang sama dengan poin yang sama seperti sebelumnya. Dalam hal kemampuan tentunya DPRD sebagai seorang wakil rakyat harus mampu memahami betapa pentingnya sebuah kebijakan berdiri dan betapa pentingnya sebuah aspirasi sehingga keinginan rakyat dan kepentingan kebijakan dapat disatukan dengan hasil yang memuaskan dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara DPL dengan kemampuan mumpuni diharapkan mampu menyusun rencana strategis guna implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dan mampu meyakinkan pihak yang kontra terhadap kebijakan ini untuk menelaah lagi tentang pentingnya pemerataan akses pendidikan skala nasional.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berada 1 tingkat di bawah DPRD dan DPL. Dalam hal ini LPMP harus memiliki kemampuan menyusun dan mempersiapkan kurikulum bagi para pengajar mengenai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang selanjutnya akan dilakukan oleh guru dan siswa. Jika sebelum adanya zonasi siswa dalam sebuah sekolah cenderung memiliki kemampuan yang sama disebabkan seleksi menggunakan nilai ambang batas, maka saat sistem zonasi diterapkan siswa dalam satu sekolah akan memiliki kemampuan beragam sebab mereka diseleksi melalui jarak dan bukan melalui nilai. Keadaan seperti ini mengharuskan LPMP menyusun kurikulum mengajar yang mampu disesuaikan.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) berada 1 peringkat di bawah LPMP. Dalam hal kemampuan, IGI atau para guru yang berada di bawah naungannya harus mampu menjalankan kurikulum yang telah disusun oleh LPMP. Pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh LPMP bagi para guru harus membuahkan hasil yaitu mempunyai guru atau tenaga pengajar memberikan kualitas mengajar yang baik berdasarkan kurikulum yang menyesuaikan keadaan sekolah semenjak diberlakukannya kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

Dosen Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan bidang pendidikan memiliki poin yang sama yaitu 0,8 dan berada di tingkat paling akhir diantara aktor lain dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah bidang kemampuan. Berada di posisi akhir bukan berarti peran kedua aktor tersebut tidak berpengaruh. Dosen maupun pengamat keduanya harus sama-sama memiliki kemampuan dalam menganalisis sebuah kebijakan dari tahanan formulasi, implementasi hingga evaluasi. Kemampuan menganalisis ini dijadikan sebagai sebuah kendali

dalam berjaga-jaga apabila pada prosesnya kebijakan ini sedikit tidak sesuai sehingga pendapat dosen ataupun pengamat kebijakan dapat menjadi bahan acuan untuk memperbaiki kesalahan dalam kebijakan tersebut.

5.2.2.3 Hasil Uji Aktor Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Implementasi Kebijakan: Kepribadian/ Disposisi

Tabel 78. *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Disposisi

ALTERNATIF	<i>EIGEN VECTOR</i>
Dinas Pendidikan	0,16
MKKS	0,13
DPRD	0,13
DPL	0,13
IGI	0,12
LPMP	0,12
Dosen Pendidikan	0,12
Pengamat Kebijakan	0,09

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, dalam hal kepribadian Dinas Pendidikan sebagai aktor yang perannya paling penting dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dibandingkan dengan aktor-aktor lain. Selanjutnya MKKS, DPRD, DPL, IGI, LPMP, dosen manajemen pendidikan dan pengamat kebijakan berada di bawahnya dengan selisih poin yang tidak begitu banyak. Dalam hal kepribadian, Dinas Pendidikan harus menaungi lembaga setingkat ataupun organisasi yang berada di bawah naungannya dan juga pribadi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dengan maksimal.

Dinas Pendidikan berada di peringkat teratas diantara aktor implementasi kebijakan lainnya. Dalam hal kepribadian, segala staff yang terlibat dalam Dinas Pendidikan harus memiliki

pandangan selaras dan berpegang teguh pada ketaatan hukum. Menjalankan sebuah kebijakan berarti mengemban amanah yang cukup sulit, namun pribadi yang berpegang teguh pada nilai-nilai ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 tidak akan merusak jalannya proses sebuah kebijakan menuju keberhasilan. Mementingkan kepentingan negara dibandingkan kebutuhan pribadi dan kelompok adalah prinsip yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan yang selanjutnya juga harus dimiliki oleh aktor lainnya. Memberikan pelayanan dan pemahaman tanpa pandang bulu dan menerapkan sebuah aturan secara adil dan merata adalah salah satu bentuk variabel kepribadian.

Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan Dewan Pendidikan Lampung berada 1 tingkat di bawah Dinas Pendidikan. dalam hal kepribadian, implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah oleh ketiga aktor ini berarti melanjutkan amanat Dinas Pendidikan yang sesuai dengan Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 untuk mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap adil dan jujur juga harus dikedepankan agar semua pihak sama-sama berkerja sama dalam mencapai kesuksesan kebijakan.

Ikatan Guru Indonesia (IGI), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dosen berada di peringkat ketiga dan pengamat kebijakan berada di peringkat akhir. Sama seperti aktor lainnya, para aktor yang berada di peringkat ini juga harus melanjutkan amanat Dinas Pendidikan yang sesuai dengan Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 untuk mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap adil dan jujur juga harus dikedepankan agar semua pihak sama-sama berkerja sama dalam mencapai kesuksesan kebijakan.

5.2.2.4 Hasil Uji Aktor Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Implementasi Kebijakan: Peraturan/ Struktur Birokrasi

Tabel 79. *Eigen Vector* Alternatif terhadap Kriteria Struktur Birokrasi

ALTERNATIF	<i>EIGEN VECTOR</i>
Dinas Pendidikan	0,18
MKKS	0,16
DPRD	0,13
DPL	0,15
IGI	0,09
LPMP	0,10
Dosen Pendidikan	0,09
Pengamat Kebijakan	0,09

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, dalam hal kepribadian Dinas Pendidikan sebagai aktor yang perannya paling penting dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dibandingkan dengan aktor-aktor lain. Selanjutnya MKKS, DPL, DPRD, LPMP, IGI dosen manajemen pendidikan dan pengamat kebijakan berada di bawahnya dengan selisih poin yang tidak begitu banyak. Dalam hal peraturan, Dinas Pendidikan harus menaungi lembaga setingkat ataupun organisasi yang berada di bawah naungannya dan juga pribadi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dengan maksimal.

Dinas Pendidikan selalu berada di peringkat pertama dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah untuk segala variabel termasuk variabel peraturan. Variabel peraturan merupakan variabel implementasi dengan tingkat kepentingan tertinggi daripada variabel implementasi lainnya, itu artinya variabel implementasi ini sangat utama. Dinas Pendidikan harus memegang teguh Peraturan Menteri Pendidikan yang di

dalamnya mengandung aturan mengenai Sistem Zonasi Sekolah dan selanjutnya dari aturan tersebut lahirlah kebijakan. Sebagai tangan pertama yang diamanahkan secara langsung oleh pemerintah pusat, Dinas Pendidikan harus membuat batasan-batasan tegas terhadap proses jalannya kebijakan ini sehingga dapat meminimalisir kecurangan dan memperjelas kepada lembaga, badan, organisasi dan pribadi lain sebagai aktor implementasi mengenai aturan yang berlaku dalam kebijakan ini.

Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) berada di bawah Dinas Pendidikan. Kepala sekolah yang berada di bawah naungan MKKS harus mampu mengamplifikasikan segala aturan terkait kebijakan Sistem Zonasi Sekolah kepada sekolah yang mereka pimpin masing-masing sehingga potensi kecurangan dan kesalahan dalam proses implementasi kebijakan tidak hanya mampu dicegah di lingkup pimpinan namun juga dapat dicegah di lingkup sekolah. Batasan-batasan yang jelas terkait apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan dalam implementasi harus dipertegas. Kode etik MKKS juga menjadi acuan sebuah aturan bagi masing-masing aktor untuk bertindak tidak di luar peraturan yang berlaku di bidang mereka.

Dewan Pendidikan Lampung (DPL) yang kini disebut kurang aktif dalam menangani permasalahan di bidang pendidikan masih mendapatkan tempat yang cukup tinggi sebagai aktor penting dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi DPL yang masih dan akan terus berkaitan dengan bidang pendidikan. Peraturan formal dari pusat yang sama bagi tiap aktor harus dijalankan dengan baik oleh DPL. Selain itu kode etik bagi DPL juga harus dijadikan pedoman dalam bertindak yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aktor ini.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung dikenal dengan perwakilan rakyat berada di peringkat setelah DPL. Sebagian besar kebijakan juga lahir dari pemikiran wakil rakyat sebab segala kebijakan yang lahir juga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat sebab negara ini adalah negara demokrasi. Dengan menciptakan sebuah kebijakan berdasarkan aturan-aturan yang ada, DPRD harus tetap berpedoman teguh terhadap segala aturan hukum. Kualitas kerja yang ditunjukkan harus selaras dengan kualitas diri dalam menghasilkan pekerjaan itu sendiri. Implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah menuntut DPRD untuk tetap produktif tanpa bertindak di luar batas hukum dan kode etik yang berlaku bagi mereka.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) berada di peringkat setelah DPRD. Lembaga ini juga harus menerapkan aturan hukum yang berlaku baik dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Tetap menjaga mutu pendidikan dan bahkan menjamin peningkatan mutu pendidikan tidak membuat LPMP dapat bertindak di luar batas hukum, norma serta kode etik yang berlaku. Sama halnya dengan DPRD, mutu pendidikan yang diharapkan akan semakin baik semenjak lahirnya kebijakan Sistem Zonasi Sekolah juga harus diseimbangkan dengan kualitas diri aktor implementasi yang taat aturan.

Ikatan Guru Indonesia (IGI), dosen manajemen pendidikan dan pengamat kebijakan berada di tingkat paling akhir, namun tidak berarti keberadaan para aktor ini tidak dipentingkan. Menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan latar keahlian masing-masing dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah harus sesuai hukum yang berlaku. Bagi IGI, seorang guru sebagai pengajar bagi siswa harus

mengajarkan hal baik yang dimulai dari kualitas diri yang baik pula sehingga para siswa akan mengikuti kebaikan yang diajarkan oleh guru tersebut. Sementara bagi dosen dan pengamat, menilai sebuah kebijakan menjadi bagian dari keahlian keduanya, dasar-dasar hukum menjadi landasan untuk melihat sesuai atau tidaknya sebuah kebijakan berjalan.

5.3 Hasil Akhir: *Eigen Vector* Alternatif dan Kriteria terhadap *Eigen Vector* Kriteria

Tahapan ini merupakan tahap paling akhir yang akan menunjukkan hierarki kepentingan aktor dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah berdasarkan keseluruhan variabel implementasi kebijakan. Berikut adalah hasil akhir penelitian:

Tabel 80. Hasil Akhir Hierarki Kepentingan Aktor Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

AKTOR IMPLEMENTASI	<i>Eigen Vector</i>
Dinas Pendidikan	0,18
MKKS	0,16
DPRD	0,13
DPL	0,13
IGI	0,10
LPMMP	0,11
Dosen Manajemen Pendidikan	0,11
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,09

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil akhir mengenai hierarki kepentingan peran aktor dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah selaras dengan teori Thompson yang membagi peran aktor implementasi kebijakan ke dalam 4 kategori berdasarkan tingkat kekuatan dan kepentingan dari masing-masing aktor. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai keterkaitan hasil akhir penelitian dengan teori yang digunakan oleh peneliti:

5.3.1 Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: *Key Players*

Aktor yang termasuk dalam kategori ini adalah aktor dengan kekuatan dan kepentingan tinggi dalam sebuah fase implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat dua aktor yang termasuk ke dalam kategori ini berkenaan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yaitu Dinas Pendidikan dan MKKS. Terlihat dalam hasil akhir perhitungan AHP kedua aktor ini menduduki peringkat pertama dan kedua yang artinya peran kedua aktor ini sangatlah penting dan sebagai kepala dari aktor-aktor yang berada di bawahnya.

Dinas Pendidikan dengan *eigen vector* 0,18 berada di peringkat pertama dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Peran Dinas Pendidikan sangat dominan sebab Dinas Pendidikan memegang kendali atas jalannya segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan juga ikut mempertanggungjawabkannya. Sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah, Dinas Pendidikan wajib menangani proses implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah secara intensif dan bertanggung jawab terhadapnya. Berdasarkan kekuatan sebagai instansi tertinggi yang menangani bidang pendidikan di daerah dan kepentingan membantu pemerintah pusat mensukseskan tercapainya tujuan sebuah kebijakan, Dinas Pendidikan sangat dibutuhkan peranannya.

Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dengan *eigen vector* 0,16 berada di peringkat kedua dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Peran MKKS sebagai sebuah persatuan yang menaungi seluruh peran kepala sekolah di suatu daerah, MKKS menjadi wadah diskusi para kepala sekolah mengenai segala hal terkait sekolah dan mutu pendidikan termasuk kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. MKKS wajib menyampaikan segala informasi berkaitan dengan kebijakan tersebut dan juga mempertanggungjawabkan akan keberhasilan implementasi kebijakan secara baik dan benar di sekolah mereka masing-masing. MKKS juga mengemban amanah untuk dapat membuat para wali siswa

dan calon siswa mengerti akan mekanisme baru yang hadir sejak dilaksanakannya kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Berdasarkan kekuatan dalam mengendalikan jalannya operasionalisasi sekolah yang mereka pimpin dan kepentingan mewujudkan aturan sekolah yang sesuai dengan aturan negara, MKKS sangat dibutuhkan perannya.

5.3.2 Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: *Contestsetter*

Aktor yang termasuk dalam kategori ini adalah aktor dengan kekuatan tinggi dan kepentingan rendah dalam sebuah fase implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat dua aktor yang termasuk ke dalam kategori ini berkenaan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yaitu Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan Dewan Pendidikan Lampung. Terlihat dalam hasil akhir perhitungan AHP kedua aktor ini menduduki peringkat ketiga dengan jumlah poin sama yang artinya peran kedua aktor ini sangatlah penting dalam melanjutkan koordinasi dari aktor yang berada di atasnya dan sebagai pengarah bagi aktor-aktor yang berada di bawahnya.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung dengan *eigen vector* 0,13 berada di peringkat ketiga dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Sebagai perwakilan rakyat, Komisi V DPRD Provinsi Lampung berperan dalam menyatukan antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah kebijakan yang disetujui bersama untuk ditindaklanjuti, DPRD wajib mengesahkan aturan berkaitan dengan pendidikan daerah dan ikut serta dalam menegakkan aturan tersebut serta sebagai salah satu pengendali dalam menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan kekuatan sebagai seorang dan sekelompok orang yang telah mendapat amanah dari rakyat untuk mewujudkan aspirasi rakyat juga sebagai seorang dan sekelompok orang yang wajib mengesahkan sebuah aturan terkait kepentingan negara serta kepentingan dalam melaksanakan tugas guna memenuhi evaluasi penilaian seorang anggota dewan, DPRD sangat dibutuhkan peranannya.

Dewan Pendidikan Lampung (DPL) dengan *eigen vector* 0,13 berada di peringkat ketiga dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Dewan Pendidikan Lampung (DPL) sebagai sebuah kelompok orang yang secara sah diberikan amanah menangani hal-hal terkait pendidikan dan mutu pendidikan, DPL menjadi wadah diskusi para kepala sekolah mengenai segala hal terkait sekolah dan mutu pendidikan termasuk kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. DPL wajib ikut serta dalam meninjau kembali dan melakukan penilaian intensif terhadap kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yang sedang berjalan guna memberi masukan dan mempertahankan segala sesuatu yang mempercepat tercapainya tujuan kebijakan. Berdasarkan kekuatan sebagai seorang dan sekelompok orang yang memiliki kecakapan di bidang pendidikan serta mengemban amanah mewujudkan pendidikan yang layak dan kepentingan ikut serta dalam mensukseskan sebuah produk kebijakan unggulan, DPL sangat dibutuhkan perannya.

5.3.3 Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: *Subject*

Aktor yang termasuk dalam kategori ini adalah aktor dengan kekuatan rendah dan kepentingan tinggi dalam sebuah fase implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat dua aktor yang termasuk ke dalam kategori ini berkenaan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Terlihat dalam hasil akhir perhitungan AHP kedua aktor ini menduduki peringkat keempat dan kelima dengan yang artinya meskipun memiliki kepentingan tinggi tidak membuat kedua aktor ini menduduki peringkat aktor dengan peran lebih penting dibandingkan dengan aktor yang memiliki kepentingan rendah dan kekuatan tinggi.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dengan *eigen vector* 0,11 berada di peringkat keempat dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Sebagai perwakilan rakyat, Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP) sebagai sebuah lembaga yang diamanahkan menjamin mutu pendidikan dengan segala kondisi dan menyesuaikan kurikulum pengajar dan bahan ajar demi peningkatan kualitas pendidikan, LPMP wajib memberikan pelatihan bagi para tenaga pendidik atau pengajar secara berkala dengan menyesuaikan perubahan yang ada termasuk sejak hadirnya kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Berdasarkan kekuatan sebagai lembaga yang berwenang memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik dan kepentingan mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan dalam segala situasi dan perubahannya, LPMP sangat dibutuhkan peranannya.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) dengan *eigen vector* 0,10 berada di peringkat kelima dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Ikatan Guru Indonesia (IGI) sebagai persatuan yang menaungi tenaga pendidik dan menjadi wadah berdiskusi antara sesama tenaga pendidik agar masing-masing tenaga pendidik berkembang dalam meningkatkan kualitas diri yang berdampak pada peningkatan kualitas bahan ajar serta hasil mengajar. IGI wajib memahami arti dari kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi sejak berlakunya kebijakan tersebut. Berdasarkan kekuatan sebagai anggota tenaga pengajar yang dapat diarahkan dan juga mengarahkan serta kepentingan mewujudkan suasana belajar mengajar yang menarik dan efektif serta efisien agar dapat memberikan hasil positif bagi kemajuan pendidikan Indonesia, IGI sangat dibutuhkan perannya.

5.3.4 Kategori Aktor Implementasi Kebijakan: *Other Followers*

Aktor yang termasuk dalam kategori ini adalah aktor dengan kekuatan rendah dan kepentingan rendah dalam sebuah fase implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat dua aktor yang termasuk ke dalam kategori ini berkenaan dengan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yaitu Dosen Manajemen Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pendidikan. Terlihat dalam hasil akhir

perhitungan AHP kedua aktor ini menduduki peringkat keenam dengan poin sama yaitu 0,09 yang artinya peran kedua aktor ini sangatlah penting dalam melanjutkan koordinasi dari aktor yang berada di atasnya sekaligus sebagai penilai, pengamat dan pemberi saran bagi aktor yang berada di atasnya.

Dosen Manajemen Pendidikan dengan *eigen vector* 0,09 berada di peringkat keenam dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Dosen Manajemen Pendidikan sebagai pengajar bagi para tenaga pendidik dan calon tenaga pendidik dengan keahliannya menguasai segala hal terkait pendidikan dan kebijakan yang ada di dalamnya, dosen wajib memberikan masukan dan arahan berdasarkan penelitian terdahulu mengenai kebijakan Sistem Zonasi Sekolah atau kebijakan sejenisnya melalui sebuah forum baik formal ataupun non formal sehingga kebijakan tersebut dapat didesain sebaik mungkin dan terarah. Berdasarkan kekuatan sebagai seorang ahli dalam bidang pendidikan dan kepentingan ikut serta mewujudkan keberhasilan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah demi pemerataan akses pendidikan, dosen sangat dibutuhkan peranannya.

Pengamat Kebijakan Pendidikan dengan *eigen vector* 0,09 berada di peringkat keenam dalam hal implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Pengamat Kebijakan Pendidikan adalah seorang ahli kebijakan terutama di bidang pendidikan dan tanggapannya dibutuhkan sebab berpengaruh dalam menilai sebuah kebijakan yang berdampak luas. Pengamat wajib melakukan analisis, penilaian dan tinjauan lebih lanjut serta berulang bagi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah guna menghilangkan kesalahan yang sudah terjadi dan menghindari kesalahan yang akan terjadi. Berdasarkan kekuatan sebagai seorang pengamat yang dengan keahliannya bisa menilai jalannya sebuah kebijakan dari segala segi dan kepentingan ikut serta mewujudkan keberhasilan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah demi pemerataan akses pendidikan, pengamat sangat dibutuhkan perannya.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berkaitan dengan kondisi mutu pendidikan, terlihat masih belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia. Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalankan Kebijakan Zonasi Pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019. Sebagai bagian dari Indonesia, Provinsi Lampung yang memiliki 15 Kabupaten/Kota dengan cukup banyak sarana pendidikan. Penelitian ini berfokus pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat di Provinsi Lampung sebab SMA di Provinsi Lampung memiliki jumlah paling rendah jika dibandingkan dengan SD maupun SMP.

Dikaitkan dengan studi kasus PPDB zonasi SMA di Provinsi Lampung, peneliti menggunakan teori Goerge C Edward III dalam menetapkan variabel implementasi berupa; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sementara aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan FKIP Unila dan Pengamat

Kebijakan Pendidikan dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan teori Thompson yaitu; *key players*, *contest setter*, *subject* dan *other followers*.

Dalam penelitian ini data didapatkan melalui metode kuesioner yang selanjutnya diolah menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Variabel implementasi berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi kriteria dan aktor implementasi menjadi alternatif dalam pengolahan data untuk mencari aktor mana yang paling dominan dalam implementasi kebijakan PPDB zonasi berdasarkan variabel yang tersedia. Berdasarkan hasil olah data maka didapatkan urutan kepentingan variabel implementasi dalam kebijakan PPDB zonasi adalah; struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi.

Sementara urutan kepentingan aktor implementasi dalam kebijakan PPDB zonasi adalah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan FKIP Unila dan Pengamat Kebijakan Pendidikan. Urutan kepentingan baik variabel implementasi maupun aktor implementasi didapatkan melalui nominal *eigen vector* dari masing-masing variabel dan aktor implementasi.

6.2 Saran

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan urutan kepentingan baik variabel implementasi maupun aktor implementasi dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran peneliti:

1. Urutan kepentingan variabel implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Namun, hasil tersebut tidak untuk dijadikan alasan bahwa hanya ada satu atau dua variabel implementasi kebijakan yang secara terus menerus diterapkan dan menjadi dominan dibandingkan variabel implementasi kebijakan yang lain. Semua

variabel implementasi kebijakan memiliki kepentingan yang hampir sama besarnya yang artinya seluruhnya memiliki peran yang sama penting dan saling melengkapi satu sama lain untuk membantu tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan.

2. Urutan kepentingan aktor implementasi kebijakan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan FKIP Unila dan Pengamat Kebijakan Pendidikan. Sama halnya dengan variabel implementasi kebijakan, meskipun terdapat hierarki dalam pentingnya peran aktor implementasi kebijakan, semua aktor harus terlibat dan saling bekerja sama satu dan lainnya demi tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan.
3. Setiap aktor yang terlibat dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah baik sejak tahapan formulasi, implementasi maupun evaluasi harus bekerja berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Memegang teguh ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 sebagai landasan dalam menjalankan peran sebagai seorang aktor kebijakan dan mematuhi segala kode etik dan norma yang berlaku menjadi hal wajib yang harus dimiliki oleh tiap-tiap aktor kebijakan. Prinsip mendahulukan kepentingan kelompok atau dalam hal ini negara daripada mendahulukan kepentingan pribadi juga wajib diterapkan oleh tiap aktor yang terlibat demi tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, S. Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Pancar Siwah. Jakarta. 309 halaman.
- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Jakarta. 234 halaman.
- Anderson, James, A. 1997. *Public Policy Making Third Edition*. Houghton Mifflin Company. USA. 384 halaman.
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 320 halaman.
- Dunn, W. 2004. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 687 halaman.
- Dye, T. R. 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff. New Jersey. 378 halaman.
- Easton, D. 1953. *The Political System*. Knopf. New York. 268 halaman.
- Edward III, G. C. (n.d.). 1990. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc. London-England. 662 halaman.
- Eyestone, R. 1971. *The Treads of Public Policy; A Study in Policy Leadership*. Boobs-Merrill. San Fransisco. 555 halaman.

- Fuad, A. dan K. S. N. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. PT Graha Ilmu. Yogyakarta. 105 halaman.
- Gortner, H. 1984. *Administration in The Public Sector*. John Willy. New York. 264 halaman.
- Jenkins, W. I. 1978. *Policy Analysis*. Martin Robertson. Oxford. 278 halaman.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* (Ricky Ismanto (ed.)). PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 490 halaman.
- Kadji, Y. 2008. *Implementasi Kebijakan: Dalam Perspektif Realitas*. Cahaya Abadi. Tulung Agung. 118 halaman.
- Kirk, J. dan M. L. M. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. SAGE Publications. London. 280 halaman.
- Lasswell, H.D & Kaplan, A. 1970. *Power and Society*. Yale University Press. New Heaven. 295 halaman.
- Lester, J. P. dan S. J. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach*. Wadsworth. USA. 272 halaman.
- Madani, M. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 210 halaman.
- Meutia, I. F. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Lampung. 204 halaman.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 424 halaman.
- Naihasyi, S. 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka. Yogyakarta. 210 halaman.

Nakamura, R. T. and F. S. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. St. Martin's Press. New York. 201 halaman.

Neuman, W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Pearson Education Limited. Jakarta. 594 halaman.

Nugroho, D. R. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 320 halaman.

Nugroho, D. R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 266 halaman.

Parsons, W. 2006. *Public Policy* (Tri Wibowo Budo Santoso (ed.)). Kencana. Jakarta. 469 halaman.

Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta. 239 halaman.

Saaty, L. T. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 270 halaman.

Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grafindo. Jakarta. 319 halaman.

Starling, G. 1977. *Managing The Public Sector*. Dorsey Press. USA. 624 halaman.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 138 halaman.

Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. CV Solusi Distribusi. Yogyakarta. 202 halaman,

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Jakarta. 630 halaman.

- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 191 halaman.
- Syafiie, I. K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 268 halaman.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung- Puslit KP2W lemlit UNPAD. Bandung. 392 halaman.
- Tangkilisan, S Nogi, H. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balirung & Co. Yogyakarta, 306 halaman.
- Thompson, J. D. 1967. *Organizations in Action*. McGraw-Hill. New York. 476 halaman.
- Udoji, C. J. 1981. *The African Public Servant as a Public Policy Maker, Public Policy in Africa, Africa Assosiation for Public Administration and Management*. Addis Abeba. USA. 480 halaman.
- Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta. 272 halaman.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 466 halaman.
- Widi, R. K. 2010. *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 395 halaman.
- Wilson, J. Q. 1989. *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do it, Basic Books a Division of Harpar*. Collins Publishers. US. 464 halaman.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta. 274 halaman.

Yownis, T. 1990. *Implementation of Public Policy*. Darmouth. Sydney. 317 halaman.

Jurnal:

Amarullah, R., & Simanjorang, R. M. 2020. Planning Decision Support System Using Building Mall AHP (Analytical Hierarchy Process). *Jurnal Teknik Informatika C.I.T.* 12(1). 26–33. <https://doi.org/10.35335/cit.Vol12.2020.19.pp26-33>

Chamid, A. A. dan A. C. M. 2017. Kombinasi Metode AHP dan TOPSIS pada Sistem Pendukung Keputusan. *Prosiding SNATIF Ke -4 Tahun 2017*. 115–119. [10.35143/JKT.V6I2.3642](https://doi.org/10.35143/JKT.V6I2.3642).

Fauzi, A. N., & Dewi Rostyaningsih. 2018. Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*. 7(4). 1–18. [10.14710/jppmr.v7i4.22052](https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i4.22052).

Fitriyani; Ellya Hemud. 2016. Pemilihan paket Internet Android pada Operator Telepon GSM Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Sistem Informasi*. 8(1). 871–946. <https://doi.org/10.36706/jsi.v8i1.2229>.

Handayani, F., & Warsono, H. 2017. Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management UNDIP*. 6(1). 1–13. [10.14710/jppmr.v6i3.16543](https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16543)

Hartono. 2013. Pemanfaatan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Penentuan Jenis Barang yang akan di Produksi. *Jurnal Media Infotama*. 53(9). 1689–1699. <https://doi.org/10.37676/jmi.v9i1.28>.

Hedegaard Sørensen, C., & Paulsson, A. 2020. Contextualizing Policy: Understanding Implementation under Socio-technical Transitions. *International Journal of Public Administration* 43(12). 1055–1067. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665067>.

Hilda AM, E. 2015. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus : Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta). *Jurnal SCRIPT*. 3(1). ISSN:2338-6304.

Irawan, Y. 2018. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Beasiswa Berbasis Web Sma Islam Darul Huda Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Ilmu Komputer*. 7(1). 1–6. [10.33060/JIK/2018/Vol7.Iss1.74](https://doi.org/10.33060/JIK/2018/Vol7.Iss1.74)

Kurniawan, S., Sukristyanto, A., & Tjahjono, E. 2020. Evaluation of Public Policy of National Standard Education on Elementary School in Porong Sub-district, Sidoarjo District. *Journal of Public Policy and Administration*. 4(3). 42. [10.11648/j.jppa.20200403.13](https://doi.org/10.11648/j.jppa.20200403.13).

Munthafa, A., & Mubarak, H. 2017. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. *Jurnal Siliwangi*. 3(2). 192–201. ISSN 2477-3891.

Perdana, N. S. 2019. Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*. 3(1). 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>

Pritasari, L. A. K. B. 2019. Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan : Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation : The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogya. *Jurnal Borneo Administrator*. 15(2). 179–198. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>

Rijal, F., Madani, M., & Fatmawati, F. 2013. Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(2). 14–26. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i2.66..>

Saaty, T. L. 2004. Decision making - the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). *Journal of Systems Science and Systems Engineering*. 13. <https://doi.org/10.1007/s11518-006-0151-5>.

Sasongko, A., Astuti, I. F., & Maharani, S. 2017. Pemilihan Karyawan Baru Dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process). *Informatika*

Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer. 12(2). 88.
<http://dx.doi.org/10.30872/jim.v12i2.650>.

Takala, J. 2002. Analysing and Synthesising Multifocused Manufacturing Strategies by Analytical Hierarchy Process. *International Journal of Manufacturing Technology and Management.* 4(5).
[10.1504/IJMTM.2002.001454](http://dx.doi.org/10.1504/IJMTM.2002.001454).

Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. 2016. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati). *Journal Of Public Policy And Management Review.* 5(4). [10.14710/jppmr.v5i4.12783](http://dx.doi.org/10.14710/jppmr.v5i4.12783).

Wibowo, S. A. dan A. P. 2015. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan sebagai Filter Penerima Beasiswa Menggunakan Model Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Industri Inovatif.* 5(1). 45–52. E-ISSN: 2615-3866.

Wibowo, U. B. 2013. Intensitas Peran Aktor Kebijakan dan Kekuatan Politis Dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan.* 53(9). 1689–1699. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v6i1.4736>.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Fauzela, D. S. 2019. *Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai Upaya Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan.* Universitas Lampung.

Maliki, W. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat.* Universitas Indonesia.

Produk Hukum:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lain yang Sederajat.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 51 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Internet:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 2019. PPDB SMA Zonasi Reguler. <https://arsip.siap-ppdb.com/2019/lampung/#/030001/statistik>. diakses pada 17 Februari 2021 pukul 15.55 WIB.

Kemendikbud. 2018. Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkelas. [Publikasi.data.kemendikbud.go.id](http://publikasi.data.kemendikbud.go.id). diakses pada 16 Januari 2021 pukul 14:35 WIB.

Kemendikbud. 2020. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) per Kabupaten/Kota : Kota Bandar Lampung. referensi.data.kemdikbud.go.id. diakses pada 8 November 2020 Pukul 20.46 WIB.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145

Laman Kuisisioner

**PENENTUAN PERAN AKTOR PALING DOMINAN DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH
MENGUNAKAN PENDEKATAN *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS***

Kepada responden yang terhormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir di jurusan Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Saya selaku mahasiswa jurusan Magister Ilmu Administrasi memohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuisisioner ini. Kuisisioner ini dibuat dengan tujuan:

“Menemukan peran aktor dominan dalam rangka implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.”

Dalam upaya menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian tentang menemukan peran aktor dominan dalam rangka implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, saya membuat beberapa kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu, diharapkan pengisian kuisisioner ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan penilaian yang dirasakan responden terhadap beberapa kriteria yang ada.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner ini.

Bandar Lampung,

Iranda Putri, S.I.P.

Petunjuk:

1. Untuk memberikan penilaian terhadap elemen-elemen permasalahan dari setiap level yang sedang diteliti prioritasnya, penilaian dinyatakan dalam skal numerik (skala 1 hingga 9) dengan menggunakan skala berikut:

Skala 1 : sama pentingnya

Skala 3 : sedikit lebih penting

Skala 5 : jelas lebih penting

Skala 7 : sangat jelas lebih penting

Skala 9 : mutlak lebih penting

Skala 2, 4, 6 dan 8 adalah nilai antara.

2. Kuisisioner ini menggunakan metode ranking untuk menilai besarnya pengaruh antara satu hal dengan hal lainnya (beri tanda silang pada kotak yang anda pilih).
3. Jika elemen di sebelah kiri lebih penting daripada elemen di kolom sebelah kanan, nilai perbandingan ini diisikan pada kolom sebelah kiri, dan jika sebaliknya, maka diisikan pada sebelah kanan (lihat contoh).

Contoh pengisian kuisioner:

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan A “sama pentingnya” dengan pilihan B

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan A “sedikit pentingnya” dengan pilihan B

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan B “jelas lebih penting” dengan pilihan A

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	-----------

Artinya: pilihan B “sangat jelas lebih penting” dengan pilihan A

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan A “mutlak lebih penting” dengan pilihan B

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan B berada pada nilai *intermediate* 4, karena berada pada nilai antara 5 dan 3

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan B berada pada nilai *intermediate* 2, karena berada pada nilai antara 1 dan 3

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
-----------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

Artinya: pilihan A berada pada nilai *intermediate* 8, karena berada pada nilai antara 7 dan 9

Gambaran singkat penelitian:

Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Zonasi Pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik.

Dalam proses kebijaksanaan, sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat berdasarkan kepentingan dan kekuatan masing-masing aktor, yakni: *key player*, *contestsetter*, *subject*, *other followers* (Thompson, 1967). Empat golongan aktor yang tersedia kemudian akan dinilai siapa yang paling dominan perannya. Penilaian dilakukan menggunakan empat indikator yang biasa diaplikasikan dalam implementasi kebijakan publik atau lebih dikenal dengan variabel implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dikaitkan dengan studi kasus PPDB zonasi, maka aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, perwakilan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, perwakilan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP Unila, Pengamat Kebijakan Pendidikan FKIP Unila.

A. Data Responden

Nama :

Usia :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Tertinggi :

Lembaga/ Organisasi :

Jabatan :

B. Data Terkait Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Keterangan:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi tentang kebijakan antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Untuk memudahkan proses pengisian kuesioner kata “komunikasi” tetap digunakan sebagaimana mestinya.

b. Sumber Daya

Termasuk dalam sumberdaya antara lain staf yang relatif jumlahnya yang disertai dengan kemampuan dan keahlian yang memadai untuk keperluan implementasi kebijakan. Untuk memudahkan proses pengisian kuesioner kata sumber daya diganti dengan “kemampuan”.

c. Disposisi

Disposisi merupakan pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi pelaksana kebijakan publik. Untuk memudahkan proses pengisian kuesioner kata disposisi diganti dengan “kepribadian”.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan sesuatu dengan standar operasional prosedur yang merupakan pedoman langkah-langkah yang harus disepakati bersama berupa keseragaman pola dalam menjalankan proses implementasi kebijakan. Untuk memudahkan proses pengisian kuesioner kata struktur birokrasi diganti dengan “peraturan”.

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, variabel implementasi mana yang lebih penting dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah?

Pilihan A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pilihan B
Komunikasi																		Kemampuan
Komunikasi																		Kepribadian
Komunikasi																		Peraturan
Kemampuan																		Kepribadian
Kemampuan																		Peraturan
Kepribadian																		Peraturan

Definisi Bobot:

1 = sama penting	3 = sedikit lebih penting	5 = jelas lebih penting	7 = sangat jelas lebih penting	9 = mutlak lebih penting	2,4,6,8 = diantara keduanya
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

C. Data Terkait Aktor Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Keterangan:

Penilaian ini dilakukan dengan perbandingan terhadap delapan orang aktor baik pribadi maupun aktor di bawah naungan lembaga/organisasi sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung
- Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung
- Dewan Pendidikan Lampung
- Perwakilan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung
- Perwakilan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung
- Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP Unila
- Pengamat Kebijakan Pendidikan FKIP Unila.

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, aktor mana yang lebih penting dan paling dominan dalam mengaplikasikan variabel “komunikasi” dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah?

[illegible]

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Dosen
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Ikatan Guru Indonesia
Dewan Pendidikan Lampung																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Dosen
Dewan Pendidikan Lampung																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Dosen
Ikatan Guru Indonesia																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Dosen
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dosen Manajemen Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan

Definisi Bobot:

1 = sama penting	3 = sedikit lebih penting	5 = jelas lebih penting	7 = sangat jelas lebih penting	9 = mutlak lebih penting	2,4,6,8 = diantara keduanya
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Dosen
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Ikatan Guru Indonesia
Dewan Pendidikan Lampung																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Dosen
Dewan Pendidikan Lampung																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Dosen
Ikatan Guru Indonesia																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Dosen
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dosen Manajemen Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan

Definisi Bobot:

1 = sama penting	3 = sedikit lebih penting	5 = jelas lebih penting	7 = sangat jelas lebih penting	9 = mutlak lebih penting	2,4,6,8 = diantara keduanya
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, aktor mana yang lebih penting dan paling dominan dalam mengaplikasikan variabel “kepribadian” dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah?

[illegible]

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Dosen
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Ikatan Guru Indonesia
Dewan Pendidikan Lampung																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Dosen
Dewan Pendidikan Lampung																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Dosen
Ikatan Guru Indonesia																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Dosen
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dosen Manajemen Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan

Definisi Bobot:

1 = sama penting	3 = sedikit lebih penting	5= jelas lebih penting	7 = sangat jelas lebih penting	9 = mutlak lebih penting	2,4,6,8 = diantara keduanya
------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, aktor mana yang lebih penting dan paling dominan dalam mengaplikasikan variabel “peraturan” dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah?

[illegible]

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Dosen
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Ikatan Guru Indonesia
Dewan Pendidikan Lampung																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Dewan Pendidikan Lampung																		Dosen
Dewan Pendidikan Lampung																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
Ikatan Guru Indonesia																		Dosen
Ikatan Guru Indonesia																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Dosen
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan
Dosen Manajemen Pendidikan																		Pengamat Kebijakan Pendidikan

Definisi Bobot:

1 = sama penting	3 = sedikit lebih penting	5= jelas lebih penting	7 = sangat jelas lebih penting	9 = mutlak lebih penting	2,4,6,8 = diantara keduanya
------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

